

Surat Penawaran

18 Agustus 2026

Kepada Yth.:

Ekon Pokja 1_2026 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

di.

Tempat.

Nomor : 11831949000/1/2026/8

Perihal : Penawaran Pekerjaan Jasa Profesional Congress Organizer PTM IMTGT ke32

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: null tanggal dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Jasa Profesional Congress Organizer PTM IMTGT ke32** sebesar

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 45 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Spesifikasi teknis barang (karakteristik fisik, detail desain, toleransi, material yang digunakan, persyaratan pemeliharaan, dan persyaratan operasi), dilengkapi dengan contoh, brosur, dan gambar-gambar.
4. Metode pelaksanaan pekerjaan.
5. Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan yang disediakan (apabila dipersyaratkan).
6. Tenaga teknis/terampil.
7. Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan.
8. Identitas (jenis, tipe, dan merek) barang yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas (apabila dipersyaratkan).
9. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
10. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN

KEGIATAN KONTRAKTUAL
TAHUN ANGGARAN 2026

PENYEDIA JASA : PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643
Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

JAKARTA

KATA PENGANTAR

Dokumen Penawaran Teknis Jasa Konsultan kegiatan **JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN** ini disusun sebagai bagian dari kelengkapan dokumen penawaran, sekaligus sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta percepatan penyelesaian hambatan PSN melalui mekanisme KPPIP. Substansi proposal ini dirancang untuk memberikan dukungan yang terstruktur, berbasis pendekatan normatif, yuridis, dan debottlenecking, serta selaras dengan kerangka kebijakan dan tata kelola percepatan PSN yang berlaku pada Tahun 2026.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui proses kajian komprehensif terhadap kebutuhan dukungan PMO, dinamika pelaksanaan PSN, serta kompleksitas isu lintas sektor dan lintas kewenangan yang berkembang. Proposal ini memuat uraian mengenai pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan, strategi fasilitasi debottlenecking, rencana kerja, struktur organisasi dan personil, komposisi serta penugasan tenaga ahli, hingga jadwal pelaksanaan yang dirancang untuk memastikan dukungan yang responsif, implementable, dan policy-relevant.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan ini. Besar harapan kami agar Dokumen Penawaran Teknis Tahun 2026 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, serta berkontribusi secara nyata dalam mendukung percepatan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional..

Jakarta, Februari 2026

PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS

Kondang Wijayanto,ST

Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I DATA ORGANISASI PERUSAHAAN	1
1.1 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN	2
1.2 BIDANG AKTIVITAS	2
1.3 BIODATA PERUSAHAAN	3
1.4 ORGANISASI PERUSAHAAN	5
BAB II DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR	6
BAB III URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR	9
BAB IV TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK DAN PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK	12
4.1 PEMAHAMAN TERHADAP KAK	13
4.1.1 Latar Belakang	14
4.1.2 Tujuan	17
4.1.3 Sasaran/ Produk yang Dihasilkan	20
4.1.4 Lokasi Pekerjaan	22
4.1.5 Referensi Hukum	22
4.1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan	24
4.1.7 Keluaran yang Dihasilkan	26
4.2 APRESIASI DAN INOVASI	27
4.2.1 Apresiasi terhadap Peran dan Mandat KPPIP	27
4.2.2 Inovasi dalam Pendekatan, Teknologi, dan Kolaborasi	27
BAB V PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN PROGRAM KERJA	30
5.1 PENDEKATAN PEKERJAAN	31
5.1.1 Pendekatan Umum	31
5.1.2 Pendekatan Perencanaan Umum	32

5.1.3	Pendekatan Pelaksanaan Koordinasi Project Manajemen Office (PMO) KPPIP	33
5.1.4	Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan	34
5.1.5	Pendekatan Normatif	36
5.1.6	Pendekatan <i>Debottlenecking</i>	37
5.1.7	Pendekatan Yuridis.....	41
5.2	METODOLOGI PEKERJAAN	42
5.2.1	Metode Pengumpulan Data	43
5.2.2	Metode Analisis	44
BAB VI	JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN	60
BAB VII	KOMPOSISI TIM, PENUGASAN TENAGA AHLI, DAN ORGANISASI PELAKSANAAN	65
7.1	Komposisi Tim	66
7.2	Penugasan Tenaga Ahli.....	67
7.3	Organisasi Personil.....	78
BAB VIII	JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI	81
BAB IX	DAFTAR RIWAYAT HIDUP USULAN PERSONEL	85
BAB X	SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. Prospera Consulting Engineers	5
Gambar 4. 1 Pemahaman Kerangka Acuan Kerja	14
Gambar 5. 1 Diagram Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan suatu Proyek Strategis Nasional.....	53
Gambar 5. 2 Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan Perubahan suatu Proyek Strategis Nasional.....	54
Gambar 7. 1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Pendekatan Umum	31
Tabel 5. 2 Jenis Bottleneck dalam Proyek Infrastruktur.....	38
Tabel 5. 3 Pelaksanaan Inventarisasi Kebijakan dan Strategi	45
Tabel 7. 1 Rincian Personel Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Officer (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN.....	66
Tabel 7. 2 Uraian Tugas Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Officer (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN	68
Tabel 8. 1 Jawab Penugasan Tenaga Ahli.....	82

BAB I

DATA ORGANISASI PERUSAHAAN

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

1.1 LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

PT. Prospera Consulting Engineers merupakan salah satu perusahaan konsultan yang telah dikenal luas di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan nasional yang pada saat itu memerlukan dukungan jasa konsultansi perencanaan teknik.

Dalam kurun waktu yang relatif singkat, PT. Prospera Consulting Engineers mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa tahun setelah berdiri, seiring meningkatnya kebutuhan akan jasa konsultansi, ruang lingkup layanan perusahaan pun semakin meluas, mencakup perencanaan umum, jasa survei, studi kelayakan, perencanaan teknis, serta berbagai sektor seperti transportasi, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan dan energi, serta bidang-bidang lainnya.

Dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman di berbagai disiplin ilmu serta didukung oleh peralatan yang modern, PT. Prospera Consulting Engineers telah menunjukkan kinerja yang luas dan andal dalam berbagai jenis pekerjaan, antara lain pembangunan gedung dan pabrik, jalan dan jembatan, pelabuhan laut, bandar udara, jaringan irigasi, instalasi pengolahan dan sistem distribusi air minum, penataan kampung dan lingkungan, perencanaan kota dan wilayah, perencanaan pedesaan, pengembangan kawasan industri, hingga penyusunan analisis dampak lingkungan.

PT. Prospera Consulting Engineers telah menjadi mitra kerja yang terpercaya bagi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, sektor swasta, maupun perseorangan. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga keuangan internasional, termasuk melalui kolaborasi dengan konsultan internasional dalam pelaksanaan proyek-proyek berskala internasional.

Saat ini, PT. Prospera Consulting Engineers berkantor di Graha Mampang Lantai 2 Annex, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta Selatan 12760, serta memiliki studio di Jl. Dempo III No. 4, Mayestik – Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk mendukung pelaksanaan jasa konsultansi di seluruh wilayah Indonesia, PT. Prospera Consulting Engineers terus memperkuat kapasitas dan jangkauan layanannya.

1.2 BIDANG AKTIVITAS

1. Pembangunan Lingkungan

- Sistem dan Pembagian Air Minum;
- Drainage dan Air Limbah;
- Sistem Pembuangan Sampah; dan
- Analisis Dampak Lingkungan.

2. Perencanaan Kota dan Daerah/Wilayah/Kawasan

- Perencanaan Pembangunan Daerah Pedesaan dan Transmigrasi;
- Perencanaan Fisik Tata Ruang Daerah / Perkebunan (PIR);
- Perencanaan Kota Kecamatan, Kota Kab. / Kotamadya dan Metropolitan
- Perencanaan Daerah Kabupaten dan Propinsi;
- Perencanaan Kota;
- Perencanaan Kota Baru;
- Perencanaan Pengembangan Lingkungan dan Kebutuhan Daerah Setempat (*Community and Local Economic Development*);
- Perencanaan Ruang Terbuka Hijau;
- Perencanaan dan Pengembangan Daerah Rekreasi / Pariwisata;
- Perencanaan Transportasi Kota;
- Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri;
- Desain Kawasan Perkotaan (*Urban Design*); dan
- Pengawasan Pembangunan Kawasan Perkotaan (*Urban Development Control*).

3. Pembangunan Sumber-sumber Air

- Irigasi;
- Sumber-sumber Air;
- Pengendalian Banjir; dan
- Perencanaan Daerah Aliran Sungai.

4. Bangunan dan Arsitektur

- Perumahan, Kantor, Bangunan Komersial, Bangunan Umum;
- Bangunan Sejarah;
- Interior; dan
- Pertamanan.

5. Transportasi

- Jalan Raya dan Manajemen lalu Lintas;
- Jembatan dan Terowongan;
- Bandar Udara dan Terminal; dan
- Pelabuhan laut.

6. Bidang-Bidang Lain

- Penyelidikan Tanah;
- Inventarisasi Lahan;
- Pemetaan; dan
- Topografi dan Hidrografi.

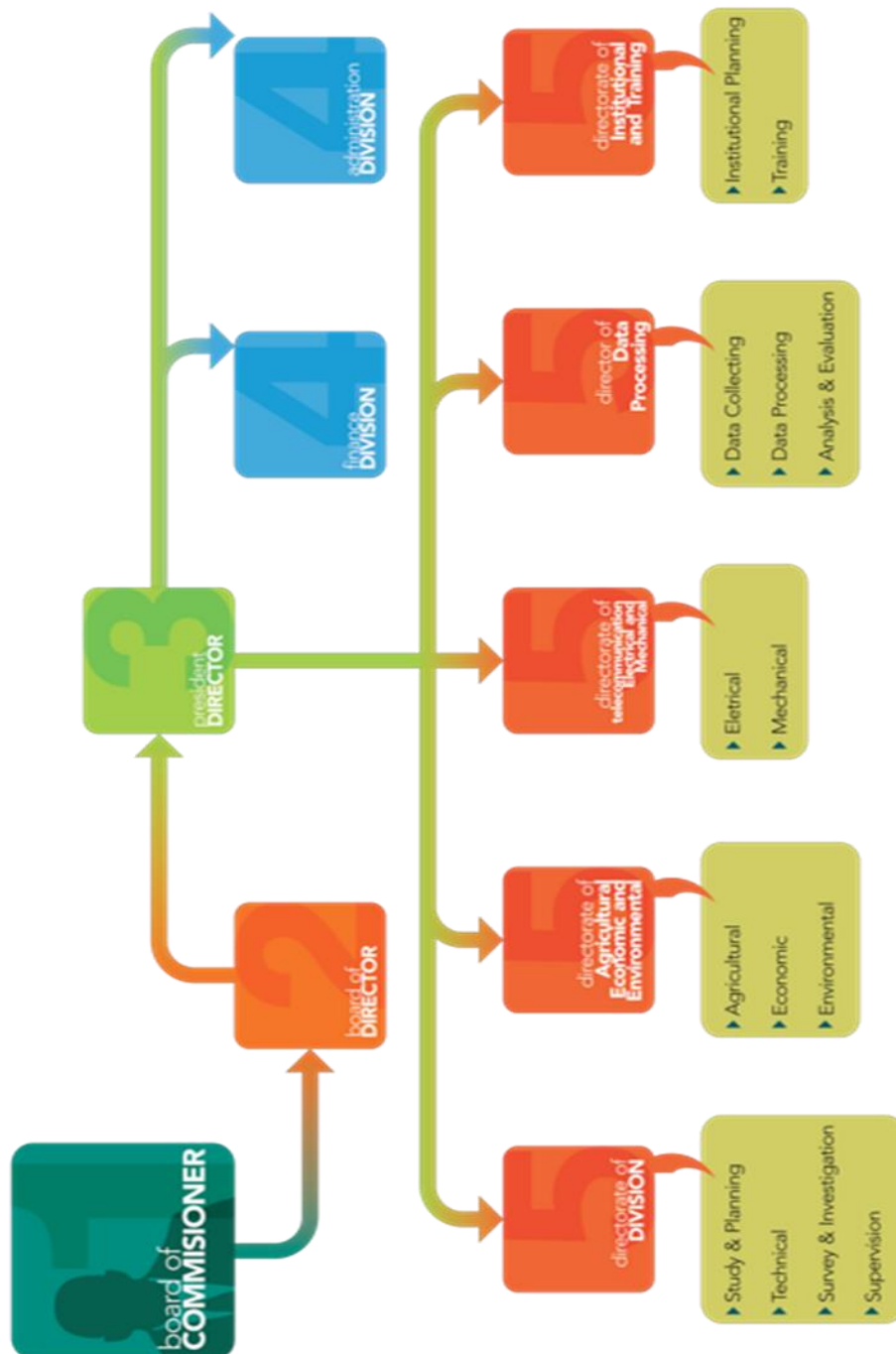
1.3 BIODATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : **PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS**
Alamat : Graha Mampang Lt. 2 Annex Jl. Mampang Prapatan
Raya No. 100 Jakarta Selatan 12760
Studio : Jl. Dempo III No. 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 1
2120

Akte Notaris Pendirian : Imas Fatimah, SH
Nomor Akta : 68
Tanggal : 30 September 1980
Akte Notaris Perubahan : Imas Fatimah, SH
Nomor : 38
Tanggal : 26 Pebruari 2002
Akte Notaris Salinan : Budiono Widjaja, SH
Nomor : 29
Tanggal : 28 Juni 2002
Akte Notaris Perubahan : Budiono Widjaja, SH
Nomor : 38
Tanggal : 26 Pebruari 2002
Akte Perubahan : Budiono Widjaja, SH
Nomor : 05
Tanggal : 04 Juni 2009
Akte Perubahan : Fauzi Agus, SH
Nomor : 20
Tanggal : 11 Maret 2016
Akte Perubahan : Fauzi Agus, SH
Nomor : 40
Tanggal : 30 Januari 2017
Akte Perubahan : Fauzi Agus, SH
Nomor : 20
Tanggal : 9 Mei 2017
No Pengesahan : AHU-AH.01.03-0136562
Tanggal Pengesahan : 16 Mei 2017
Instansi Pemberi Sah : Menteri Hukum dan HAM RI
NPWP : 01.364.330.9-061.000
SIUJK : 0904.1.80.88.00267
IUJK Pengawasan : 1-004675-3171-3-00256
IUJK Perencanaan : 1-004675-3171-3-00256
TDP : 09.03.1.74.09139
SIUP : 02862/1.824.271
Sertifikasi Badan Usaha : 0018/INKINDO/09/03/0

1.4 ORGANISASI PERUSAHAAN

Secara organisasi, PT. Prospera Consulting Engineers memiliki struktur organisasi Komisaris, Direktur Utama, Direktur dan Manajer-Manajer yang membawahi masing-masing Divisi yang sekaligus adalah sebagai Ketua Tim sesuai dengan bidangnya. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi PT. Prospera Consulting Engineers dapat dilihat pada Gambar A.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. Prospera Consulting Engineers

BAB II

DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

Seiring perjalanan waktu, perkembangan perusahaan tercermin dari meningkatnya kepercayaan yang diberikan oleh instansi Pemerintah maupun Swasta dalam memanfaatkan jasa konsultasi **PT. Prospera Consulting Engineers**. Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak menjadikan kami berpuas diri ataupun merasa telah mencapai titik kemapanan. Sebaliknya, kami menghindari sikap konservatif dengan terus melakukan pengembangan kapasitas serta melahirkan inovasi dan gagasan-gagasan baru.

Pertumbuhan sektor jasa konsultasi yang semakin pesat serta semakin beragamnya kegiatan yang dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan **PT. Prospera Consulting Engineers**.

Adapun pada tabel berikut disajikan daftar pengalaman pekerjaan sejenis yang telah dilaksanakan oleh **PT. Prospera Consulting Engineers** dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Tabel 2.1. Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

BAB III

URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

Seiring berjalannya waktu, perkembangan perusahaan tercermin dari semakin tingginya tingkat kepercayaan yang diberikan oleh instansi Pemerintah maupun Swasta dalam menggunakan jasa konsultansi **PT. Prospera Consulting Engineers**. Meskipun demikian, kepercayaan tersebut tidak menjadikan kami berpuas diri ataupun merasa telah mencapai kemapanan. Sebaliknya, kami menghindari sikap konservatif dengan terus melakukan pengembangan kapasitas serta menghasilkan inovasi dan gagasan-gagasan baru.

Pertumbuhan sektor jasa konsultansi yang semakin dinamis serta meningkatnya keragaman kegiatan yang dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan **PT. Prospera Consulting Engineers**.

Selanjutnya, tabel-tabel berikut menyajikan uraian pengalaman pekerjaan sejenis **JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO) DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN**, maupun pekerjaan sejenis lainnya, yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir

BAB IV
TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK DAN
PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT*
***MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS**
NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK
KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

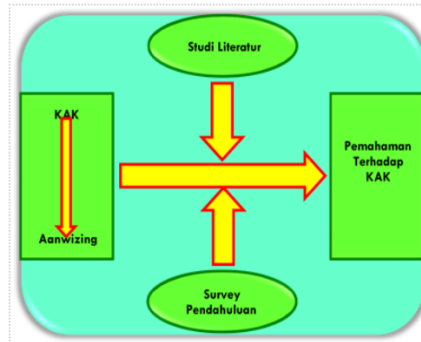
4.1 PEMAHAMAN TERHADAP KAK

KAK merupakan dokumen yang memuat spesifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan, mencakup uraian latar belakang, maksud, tujuan, lingkup pekerjaan, serta ketentuan lainnya. Oleh karena itu, sebagai langkah awal dalam memahami spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, Konsultan melakukan kajian terhadap isi KAK tersebut.

Memahami KAK menjadi langkah penting, dengan demikian kami melakukan serangkaian kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membaca KAK dan berusaha memahami keseluruhan substansinya;
2. Mengikuti *Aanwijzing*/Penjelasan yang diberikan oleh Panitia Pelelangan. Berusaha bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti atau adanya tambahan penjelasan;
3. Studi literatur terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait;
4. Studi literatur terkait pekerjaan sejenis yang telah dilakukan sebelumnya;
5. Menginventarisasi dokumen-dokumen pendukung, terutama produk-produk program dan penganggaran yang telah ada, Peraturan dan Perundang-undangan yang terkait, serta buku-buku yang terkait dengan program dan penganggaran;
6. Mendiskusikan substansi pokok dan point-point penting pada intern tim penyusun proposal/ usulan teknis untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan pandangan diantara sesama tim penyusun; dan
7. Melakukan kegiatan kajian-kajian serta pengkayaan materi-materi teknis pelaksanaan penganggaran terkait kegiatan khusus secara komprehensif maupun detail.

Berdasarkan hasil pemahaman terhadap KAK, Konsultan menilai bahwa KAK yang telah disusun secara umum telah jelas dalam menggambarkan spesifikasi serta persyaratan pekerjaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditambahkan guna menyempurnakan hasil pekerjaan yang diharapkan. Usulan penambahan tersebut akan disampaikan sebagai tanggapan Konsultan terhadap KAK. Upaya tersebut merupakan langkah awal yang menjadi dasar pertimbangan Konsultan dalam pelaksanaan pekerjaan. Secara keseluruhan, tahapan pemahaman substansi KAK Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Officer (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk Kemudahan PSN disajikan pada Gambar



Gambar 4. 1 Pemahaman Kerangka Acuan Kerja

4.1.1 Latar Belakang

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016. KPIIP bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas-tugas berikut:

1. Menyusun strategi dan kebijakan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas;
2. Memantau dan mengendalikan implementasi strategi dan kebijakan tersebut dalam konteks percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
3. Membantu membangun kapasitas aparatur dan lembaga yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur prioritas;
4. Menetapkan standar kualitas studi kelayakan awal dan prosedur evaluasinya;
5. Membantu dalam tahap pra-konstruksi studi kelayakan awal; dan
6. Memecahkan masalah yang timbul dari implementasi penyediaan infrastruktur prioritas.

Dengan didirikannya KPIIP, diharapkan keterlibatan pemerintah akan mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas mulai dari tahap perencanaan hingga tahap studi kelayakan awal dan pengembangan infrastruktur. Diperkirakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia akan tumbuh seiring dengan percepatan penyediaan infrastruktur di bawah KPIIP. KPIIP diharuskan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh fungsi lembaga atau komite yang sudah ada dan, sejauh mungkin, mencegah duplikasi peran dan otoritas dengan lembaga atau komite yang sudah ada.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Permenko 16/2025), terdapat 227 Proyek dan 24 Program yang terdaftar

sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Selain itu, juga terdapat PSN tambahan di bidang pangan, energi, air nasional, dan garam yang ditetapkan sebagai PSN melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Permenko 19/2025). Adapun total nilai investasi dari keseluruhan PSN yang telah ditetapkan melalui Permenko 16/2025 dan Permenko 19/2025 adalah 6,493 Triliun Rupiah.



Gambar 4. 2 Dasar Hukum Dasar Hukum Penetapan Daftar Proyek Strategis Nasional

Presiden memberikan arahan untuk melanjutkan PSN sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang meliputi:

1. Proyek Strategis Nasional tetap dilanjutkan sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Penyelesaian PSN yang masih berjalan dikoordinasikan bersama dengan kementerian/lembaga lain;
3. Optimalisasi PSN yang sudah terbangun, melalui sinkronisasi kebijakan antar kementerian/lembaga;
4. Mendorong penggunaan non-APBN untuk Pembangunan Infrastruktur dan pendukungnya; dan
5. Melakukan monitong dan evaluasi PSN.

Berdasarkan hasil pemantauan PMO KPPIP terhadap permasalahan dan *debottlenecking* pelaksanaan pembangunan infrastruktur, terdapat beberapa isu-isu yang perlu ditindaklanjuti. KPPIP telah merangkum daftar isu strategis yang diklasifikasikan berdasarkan jenis isu pendanaan dan pembiayaan, perizinan dan penyiapan, konstruksi, pengadaan tanah dan tata ruang serta kehutanan dan lingkungan. Selain itu, KPPIP menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan perannya, yang antara lain:

1. Perubahan undang-undang dan regulasi serta fasilitas investasi di Indonesia yang memerlukan penyesuaian dan pemahaman di semua tingkatan pemerintah;
2. Keterlibatan dan otoritas kementerian/lembaga membutuhkan koordinasi dan sinergi yang lebih intensif serta melibatkan semua pemangku kepentingan;
3. Upaya yang inovatif dan transfer pengetahuan melalui keterlibatan badan usaha diperlukan karena keterbatasan ketersediaan sumber daya fiskal, lahan, tata ruang, dan sumber daya manusia;
4. Implikasi pembangunan infrastruktur untuk pengembangan daerah masih terbatas;

Seiring dengan Arahan Presiden tentang Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengharuskan Pemerintah memprioritaskan pengembangan PSN untuk dapat mengejar target penyelesaian, diharapkan KPPIP dapat memainkan peran positif dalam melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah pada tahun 2026 dengan rencana tindakan berikut:

1. Proses persiapan yang selektif untuk pemilihan PSN;
2. Persiapan materi pemantauan dan strategi penyelesaian masalah untuk mempercepat penyelesaian PSN;
3. Persiapan draf evaluasi dan laporan percepatan implementasi PSN;
4. Pengembangan inventaris isu dan hambatan serta penyampaian rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul dari implementasi penyediaan PSN;
5. Membantu ketersediaan dokumen perencanaan, persiapan, dan implementasi sesuai dengan regulasi yang berlaku;
6. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur negara;
7. Menyiapkan regulasi pendukung untuk penyediaan PSN;
8. Menyediakan data dan laporan sebagai media komunikasi publik;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP.

KPIP memiliki mandat untuk membantu memfasilitasi dan mengatasi hambatan dalam penyediaan PSN, meliputi:

1. Menyusun strategi dan kebijakan untuk menyediakan penyediaan infrastruktur prioritas;
2. Memantau dan mengendalikan implementasi strategi dan kebijakan tersebut dalam konteks percepatan penyediaan infrastruktur prioritas;
3. Membantu membangun kapasitas aparatur dan lembaga yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur prioritas;

4. Menetapkan standar kualitas studi kelayakan dan prosedur evaluasinya;
5. Membantu dalam tahap pra-konstruksi studi kelayakan awal; dan
6. Memecahkan masalah yang timbul dari implementasi penyediaan infrastruktur prioritas.

Oleh karena itu, KPPIP memerlukan bantuan ahli profesional dan konsultan perusahaan dalam menindaklanjuti dan mengatasi masalah atau hambatan yang timbul dalam proses penyediaan PSN.

Tanggapan Terhadap Latar Belakang

Latar belakang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mandat serta peran strategis Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam mendorong percepatan penyediaan infrastruktur nasional. KPPIP, sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan lintas sektor, memegang peran kunci dalam mengoordinasikan perencanaan, penetapan kebijakan, pemantauan pelaksanaan, serta penyelesaian berbagai hambatan proyek infrastruktur prioritas.

Kami mengapresiasi penjabaran mengenai kompleksitas tantangan yang dihadapi KPPIP, khususnya terkait:

1. Kebutuhan akan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan,
2. Keterbatasan fiskal dan sumber daya,
3. Serta pentingnya pemanfaatan sumber pendanaan non-APBN dan transfer pengetahuan dari badan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan kesiapan untuk mendukung KPPIP melalui penyediaan tenaga ahli dan tim konsultan profesional yang berpengalaman dalam proses seleksi proyek, pemantauan pelaksanaan, perumusan strategi penyelesaian hambatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan pendekatan berbasis data dan kebijakan, kami optimis dapat berkontribusi secara efektif dalam mendukung percepatan penyediaan PSN sesuai arahan Presiden dan mandat KPPIP.

4.1.2 Tujuan

Adapun tujuan kegiatan KPPIP pada TA 2026 lebih difokuskan pada:

1. Mendorong analisa dan menyusun rancangan rekomendasi terkait kebijakan dan percepatan penyelesaian PSN;
2. Mengumpulkan data dan memberikan analisa dalam mendukung proses monitoring PSN (sejumlah 204 proyek dan 13 program berdasarkan Permenko No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional);

3. Mendukung PMO dalam melaksanakan kegiatan debottlenecking/penyelesaian hambatan yang timbul pada PSN dalam bentuk pengumpulan data dan analisa;
4. Memberikan analisa dan menyusun rancangan rekomendasi untuk mendukung PMO dan Tim Pelaksana terkait penyusunan dan perbaikan kebijakan dan peraturan infrastruktur;
5. Melaksanakan evaluasi dan peninjauan kembali atas pelaksanaan PIP;
6. Menyiapkan kerangka monitoring dan evaluasi PSN termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) untuk memantau kemajuan pelaksanaan PSN secara menyeluruh dan berkesinambungan;
7. Menyiapkan laporan setiap semester untuk pelaporan kegiatan KPPIP kepada Presiden dan para pihak terkait;
8. Menyiapkan substansi untuk penugasan lainnya yang diberikan oleh ketua tim pelaksana dan/atau sekretaris tim pelaksana;
9. Mengelola bahan dan substansi yang diberikan kepada sekretariat KPPIP yang berasal dari kementerian, lembaga atau badan usaha terkait dengan PSN;
10. Mendukung kegiatan administrasi, fasilitasi dan penjadwalan rapat dan konsinyering, perjalanan dinas serta sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tim Pelaksana dan Sekretariat KPPIP
11. Manajemen dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP selama Tahun Anggaran 2026.

Sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan infrastruktur, KPPIP diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja dari K/L atau instansi terkait serta memberikan arahan demi menyelesaikan konflik antar instansi. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, KPPIP memiliki kewajiban untuk memastikan agar proyek dan atau program di dalam daftar PSN dapat diselesaikan atau dapat dipastikan waktu penyelesaiannya, pembiayaan tidak menggunakan APBN, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Tanggapan Terhadap Tujuan

Kami memahami bahwa pengadaan jasa konsultan ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis dan substantif kepada Project Management Office (PMO) beserta seluruh tim kerja dalam struktur KPPIP, guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan fungsi KPPIP sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebijakan nasional. Selanjutnya, kami menilai bahwa tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam KAK telah selaras dengan kebutuhan strategis organisasi, khususnya dalam mendukung analisis kebijakan, pemantauan pelaksanaan proyek, penyelesaian hambatan, serta penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan.

Secara khusus, tanggapan kami adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan & Rekomendasi

Kami siap memberikan dukungan dalam penyusunan kajian kebijakan serta rekomendasi percepatan penyelesaian PSN yang berbasis data, prinsip tata kelola yang baik, dan keterpaduan lintas sektor.

2. Monitoring PSN

Monitoring PSN merupakan kegiatan pengawasan dan evaluasi atas proyek prioritas nasional guna memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, sasaran, dan target yang ditetapkan. Monitoring mencakup aspek jadwal, anggaran, kualitas, serta identifikasi kendala dan solusi. Tim kami memiliki kapabilitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data proyek infrastruktur skala nasional, termasuk penyusunan indikator kinerja dan dashboard pemantauan.

3. Debottlenecking PSN

Debottlenecking PSN merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek strategis nasional. Kami akan mendukung PMO dalam mengelompokkan isu teknis, administratif, dan regulasi, serta merumuskan alternatif solusi guna memastikan proyek berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

4. Perbaikan Kebijakan & Regulasi

Dengan pengalaman dalam pendampingan perbaikan dan revisi kebijakan sektoral, kami akan menyediakan analisis berbasis bukti dan praktik terbaik untuk mendukung KPPIP dan Tim Pelaksana.

5. Evaluasi PIP & PSN

Evaluasi PIP dan PSN dilakukan untuk menilai kinerja dan dampak proyek infrastruktur prioritas secara periodik. Tim akan melaksanakan evaluasi secara sistematis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta memperhatikan aspek relevansi, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

6. Kerangka Monitoring & Evaluasi (M&E)

Kami akan menyusun kerangka M&E yang terstruktur dan adaptif, serta selaras dengan sistem pelaporan KPPIP guna mendukung pemantauan progres PSN secara berkelanjutan.

7. Pelaporan Berkala

Laporan semesteran akan disusun secara komprehensif dan akuntabel sebagai bahan pelaporan kegiatan kepada Presiden.

8. Tugas Tambahan dari Pimpinan

Tim kami siap melaksanakan penugasan tambahan atau ad-hoc dari Ketua dan/atau Sekretaris Tim Pelaksana secara fleksibel dan tepat waktu.

9. Manajemen Substansi dari Mitra Sektor

Kami akan mendukung pengelolaan dokumen dan substansi yang disampaikan oleh K/L/BUMN mitra agar tersaji secara ringkas, terstruktur, dan strategis bagi Sekretariat KPPIP.

10. Manajemen Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan akan didokumentasikan secara sistematis, mencakup laporan teknis, notulen, hasil pemantauan, serta rekapitulasi komunikasi formal pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

Dengan dukungan tim konsultan yang berpengalaman dalam bidang kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan Proyek Strategis Nasional, kami optimistis dapat mendukung pencapaian tujuan KPPIP secara optimal dan profesional.

4.1.3 Sasaran/ Produk yang Dihasilkan

Terkait tujuan di atas, maka sasaran dari pengadaan konsultan pendukung KPPIP adalah membantu PMO KPPIP beserta tim-tim kerja dalam KPPIP sesuai dengan tujuan yang disebutkan:

1. Terpenuhinya target kerja KPPIP tahun 2026 yang terlaksana dengan kualitas yang baik, efektif dan tepat waktu;
2. terselesaikannya kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian PSN sehingga penyediaan proyek dapat berjalan tepat waktu dengan kualitas yang diterima oleh pemangku kepentingan terkait;
3. Tersedianya rancangan rekomendasi terkait penyusunan dan perbaikan kebijakan dan peraturan infrastruktur;
4. Tersedianya data dan analisa hasil proses monitoring PSN;
5. Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PIP;
6. Tersedianya bahan substansi kegiatan yang dibutuhkan oleh ketua tim pelaksana dan/atau sekretaris tim pelaksana;
7. Tersedianya sistem penjadwalan rapat dan kegiatan yang akurat dan dapat terlaksana;
8. Tersusunnya dokumentasi dan administrasi seluruh kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas;
9. Tersusunnya manajemen dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP selama Tahun Anggaran 2026

Tanggapan Terhadap Sasaran/ Produk yang Dihasilkan

Kami memahami bahwa sasaran utama dari pengadaan jasa konsultan pendukung KPPIP adalah untuk memastikan ketercapaian hasil kerja KPPIP yang terukur,

berkualitas, dan selaras dengan mandat strategis percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2026. Sasaran-sasaran tersebut sangat relevan dalam menjamin implementasi kegiatan KPPIP yang tidak hanya berjalan tepat waktu, tetapi juga menghasilkan output yang dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan.

Adapun tanggapan kami terhadap delapan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Target Kerja KPPIP Tahun 2026

Kami berkomitmen menyelaraskan rencana kerja dengan target KPPIP melalui pendekatan kerja terstruktur dan berbasis hasil, dengan penekanan pada mutu pelaksanaan, ketepatan waktu, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya.

2. Terselainya Kendala Penyelesaian PSN

Tim kami akan mendukung identifikasi dan penanganan hambatan secara proaktif melalui penerapan root cause analysis serta penyusunan rekomendasi operasional yang aplikatif dan dapat langsung diimplementasikan oleh tim pelaksana.

3. Tersedianya Rancangan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

Dengan pendekatan kebijakan berbasis bukti, kami akan menyusun dokumen rekomendasi yang memperhatikan kepentingan lintas sektor, kelayakan pelaksanaan, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

4. Tersedianya data dan analisa hasil proses monitoring PSN

Kami akan mendukung pengolahan dan visualisasi data monitoring proyek melalui platform yang adaptif untuk memudahkan pelaporan dan pengambilan keputusan, termasuk penyediaan dashboard digital berbasis web atau spreadsheet interaktif yang memungkinkan pemantauan data secara real-time, kapan pun dan di mana pun.

5. Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PIP

Evaluasi pelaksanaan PIP akan dilakukan menggunakan indikator yang objektif dan kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing proyek, guna memberikan gambaran komprehensif atas progres dan capaian aktual.

6. Tersedianya bahan substansi kegiatan yang dibutuhkan oleh ketua tim pelaksana dan/atau sekretaris tim pelaksana

Kami akan menyiapkan bahan substansi yang bersifat executive-ready, disusun secara ringkas namun padat, untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh ketua maupun sekretaris tim pelaksana.

7. Tersedianya sistem penjadwalan rapat dan kegiatan yang akurat dan dapat terlaksana

Sistem penjadwalan disusun secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk memastikan seluruh rapat dan kegiatan terlaksana sesuai rencana, meminimalkan benturan jadwal, serta mendukung ketepatan waktu pelaksanaan

8. Tersusunnya dokumentasi dan administrasi seluruh kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas

Seluruh kegiatan konsinyering dan perjalanan dinas didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumentasi tersebut mencakup pencatatan kegiatan, arsip surat-menyurat, serta bukti pendukung administrasi guna mendukung akuntabilitas, pelaporan, dan proses evaluasi di kemudian hari.

9. Tersusunnya manajemen dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP selama Tahun Anggaran 2026.

Seluruh kegiatan akan didokumentasikan secara tertib dalam format digital dan fisik, disusun sistematis dan terarsip dengan baik, guna mendukung kebutuhan evaluasi, audit, serta penelusuran data di masa mendatang

4.1.4 Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan bertempat di Gedung Pos Ibukota. Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1. Jakarta-Pusat. KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas). Lantai 6. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tanggapan Terhadap Lokasi Pekerjaan

Konsultan memahami dan cukup jelas mengenai Lokasi Pekerjaan.

4.1.5 Referensi Hukum

1. Peraturan Presiden No. 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Tanggapan Terhadap Referensi Hukum

Konsultan memahami dan cukup jelas mengenai referensi hukum sebagai rujukan dalam kegiatan dukungan PMO dalam PSN.

4.1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan

Adapun lingkup pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infratraktur dan pengembangan wilayah untuk kemudahan bagi PSN adalah:

1. Memberikan dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat dan PMO KPPIP melalui usaha pengumpulan data dan analisa, pemberian rekomendasi strategi dan kebijakan dalam rangka penyediaan PSN, khususnya pada sektor air, jalan, transportasi, energi, dan kawasan;
2. Melakukan pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)
 - a. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan, melakukan analisis hambatan, dan merekomendasikan solusi untuk percepatan PSN, baik dari aspek regulasi dan implementasi;
 - b. Menyusun, menganalisis dan membuat laporan rapat pemantauan dan debottlenecking terkait PSN serta laporan terkait monitoring dan evaluasi kemajuan PSN;
3. Melaksanakan evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP), sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No. 122 Tahun 2016;
4. Melakukan pengumpulan data, analisis, serta memberikan rekomendasi strategi dan kebijakan dalam mendukung proses monitoring PSN;
5. Menganalisis dan menyusun substansi rapat monitoring, debottlenecking serta forum koordinasi lintas sektor, maupun penugasan khusus yang diberikan Ketua Tim Pelaksana dan/atau Sekretaris Tim Pelaksana terkait PSN;
6. Membantu Ketua Tim Pelaksana dalam menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN;

7. Melakukan pendampingan administrasi kegiatan rapat, konsinyering dan perjalanan dinas;
8. Melakukan manajemen dan dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP Semester kedua Tahun 2026;

Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Pekerjaan

Kami menilai bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam KAK telah secara komprehensif mencerminkan mandat dan ekspektasi peran konsultan dalam mendukung KPPIP, khususnya dalam penguatan fungsi Project Management Office (PMO), percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh ruang lingkup pekerjaan melalui pendekatan yang terstruktur, kolaboratif, dan berbasis hasil, dengan tanggapan terhadap setiap butir sebagai berikut:

1. Dukungan Strategis bagi Ketua Tim, Sekretariat, dan PMO KPPIP
Kami akan menugaskan tim analis sektoral yang memiliki pemahaman mendalam terhadap sektor air, jalan, transportasi, energi, dan kawasan, guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, kontekstual, serta responsif terhadap dinamika nasional dan daerah.
2. Pendampingan Percepatan PSN
 - a. Dalam proses identifikasi dan analisis hambatan PSN, kami akan menerapkan problem-tree analysis dan stakeholder mapping untuk memetakan permasalahan secara sistematis serta merumuskan solusi yang operasional dan dapat ditindaklanjuti.
 - b. Setiap hasil rapat pemantauan dan debottlenecking akan dirangkum dalam laporan analitis dan rekomendatif, dilengkapi visualisasi perkembangan proyek, isu lintas sektor, serta rencana tindak lanjut yang jelas.
3. Evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)
Evaluasi PIP akan disusun berdasarkan indikator kinerja proyek, tingkat capaian, serta efektivitas implementasi kebijakan, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 dan dokumen perencanaan terkait.
4. Dukungan monitoring PSN
Pengumpulan dan analisis data akan dilakukan secara berkelanjutan melalui pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, guna mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengambilan keputusan oleh PMO.
5. Menganalisis dan menyusun substansi rapat monitoring, debottlenecking serta forum koordinasi lintas sektor, maupun penugasan khusus.

Kami akan menyiapkan bahan substansi rapat dan forum koordinasi lintas sektor yang strategis dan tajam, serta mendokumentasikan seluruh dinamika pembahasan dan rekomendasi sebagai bahan pelaporan dan perumusan kebijakan lanjutan.

6. Penyusunan Laporan PSN kepada Presiden dan Laporan Semester;
Laporan akan disusun sesuai format dan struktur yang ditetapkan KPPIP, dilengkapi ringkasan eksekutif, analisis tematik per sektor, serta narasi perkembangan penanganan hambatan (debottlenecking).
7. Pendampingan administrasi kegiatan rapat, konsinyering dan perjalanan dinas;
Pendampingan administrasi secara aktif melalui penyiapan dan pengelolaan seluruh dokumen pendukung kegiatan rapat, konsinyering, dan perjalanan dinas, termasuk penyusunan jadwal, undangan, daftar hadir, notula, serta kelengkapan administrasi perjalanan dinas.
8. Manajemen dan dokumentasi Semester II Tahun 2026
Kami akan menerapkan sistem dokumentasi digital yang terorganisasi untuk seluruh kegiatan, mencakup kronologi pelaksanaan, keluaran rapat, hasil analisis, serta komunikasi antar pihak, guna memastikan akuntabilitas dan keterlacakan kegiatan.

4.1.7 Keluaran yang Dihasilkan

No	<i>Output/Deliverable</i>	Jadwal Penyerahan
1.	Laporan Pendahuluan/Rencana kerja tim PMO	2 minggu setelah kontrak ditanda tangani
2.	Laporan periodik dukungan tim PMO dan Dashboard PSN	Setiap bulan
3.	Substansi Laporan Pelaksanaan PSN kepada Presiden	Pertengahan Bulan Agustus (Semester 1) Akhir Bulan Desember (Semester 2)
4.	Substansi Laporan Semester PSN	Pertengahan Bulan Agustus (Semester 1) Akhir Bulan Desember (Semester 2)
5.	Laporan Final Kegiatan	Akhir Kontrak

Tanggapan Terhadap Keluaran yang Dihasilkan

Konsultan memahami secara jelas dan menyeluruh keluaran yang harus dihasilkan dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Officer (PMO) pada Proyek Strategis Nasional (PSN) serta kebijakan percepatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung kemudahan PSN. Seluruh keluaran tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.

4.2 APRESIASI DAN INOVASI

4.2.1 Apresiasi terhadap Peran dan Mandat KPPIP

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran strategis Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). KPPIP tidak hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tetapi juga berperan signifikan sebagai fasilitator, pengurai kendala (debottlenecking), serta pengarah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur prioritas. Konsistensi KPPIP dalam menjaga arah kebijakan strategis, menjamin mutu pelaksanaan proyek, serta mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan wilayah menjadi landasan utama dalam merespons dinamika dan kompleksitas pembangunan nasional. Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika perubahan regulasi, kemampuan KPPIP dalam menyelaraskan kebijakan serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan patut diapresiasi.

Kami juga menilai bahwa inisiatif KPPIP dalam melibatkan tenaga ahli profesional dan badan usaha konsultan merupakan langkah progresif guna memastikan tersedianya dukungan teknis yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan proyek strategis. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan dan kolaborasi dalam mendorong penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

4.2.2 Inovasi dalam Pendekatan, Teknologi, dan Kolaborasi

Sebagai wujud kontribusi nyata, kami tidak hanya menghadirkan tim yang kompeten dan berpengalaman, tetapi juga menawarkan sejumlah inovasi dalam pendekatan kerja yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas KPPIP, antara lain:

1. Sistem Pelaporan Adaptif dan Visualisasi Interaktif

Kami mengusulkan penerapan dashboard monitoring digital berbasis web maupun spreadsheet interaktif yang memungkinkan akses data secara real-time, pemantauan progres kegiatan, serta identifikasi *bottleneck* baik secara sektoral maupun spasial. Pendekatan ini akan mendukung percepatan pengambilan keputusan dan memperkuat komunikasi lintas unit kerja.

2. Kerangka Evaluasi Multi-Dimensi

Kami akan menyusun kerangka evaluasi terpadu yang mengombinasikan analisis logical framework (*logframe*), evaluasi dampak kebijakan (*policy impact*), serta penilaian readiness level proyek PSN yang sedang berjalan maupun dalam tahap persiapan. Kerangka ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh terkait tingkat kesiapan, tantangan utama, serta strategi penyelesaiannya.

3. Template Dokumen Dinamis dan Modular

Untuk menjamin efisiensi dan konsistensi dalam pelaporan, kami akan mengembangkan template dokumen yang bersifat modular dan mudah disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, seperti laporan kepada Presiden, laporan semester, laporan evaluasi, serta materi koordinasi lintas sektor. Seluruh dokumen akan terintegrasi dalam sistem manajemen dokumen berbasis cloud atau sistem lokal sesuai kebijakan KPPIP.

4. Simulasi Kebijakan dan Skema Intervensi

Dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, kami akan memanfaatkan pendekatan policy simulation berbasis pemetaan skenario (*scenario mapping*) dan analisis risiko (*risk analysis*) guna mengevaluasi berbagai alternatif intervensi percepatan PSN. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang realistis, terukur, dan berbasis dampak.

5. Ruang Kolaborasi Digital untuk Tim Kerja

Untuk mendukung efektivitas koordinasi internal KPPIP, kami akan memfasilitasi penggunaan ruang kerja digital, seperti Microsoft One Drive, Google Workspace, Notion, Trello, atau platform lain sesuai arahan, sehingga komunikasi lintas bidang dapat terdokumentasi dengan baik, berjalan efektif, serta mudah dimonitor oleh Sekretariat maupun Tim Pelaksana.

6. Pendekatan Fleksibel dan Responsif

Kami memahami bahwa dinamika PSN sangat dipengaruhi oleh faktor politik, regulasi, dan perubahan prioritas pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan kerja kami dirancang fleksibel dan adaptif, termasuk kesiapan dalam memberikan dukungan *quick response briefing* bagi pimpinan KPPIP apabila diperlukan.

7. Peningkatan Kapasitas Internal melalui Knowledge Transfer

Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, kami akan memastikan terjadinya proses alih pengetahuan dan penguatan kapasitas bagi staf internal KPPIP melalui sesi berbagi, dokumentasi prosedur kerja, serta pelatihan teknis singkat

(*microtraining*). Dengan demikian, hasil pekerjaan tidak hanya bersifat output semata, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Dengan kolaborasi yang solid, inovasi dalam pelaksanaan tugas, serta komitmen terhadap berbagi pengetahuan, kami meyakini bahwa dukungan yang diberikan akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tujuan KPPIP, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB V

PENDEKATAN, METODOLOGI, DAN PROGRAM KERJA

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER* (PMO) DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

5.1 PENDEKATAN PEKERJAAN

Dalam rangka mencapai sasaran pelaksanaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infrastruktur serta pengembangan wilayah, disusun pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta pengendalian kegiatan. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar metodologi kerja guna menjamin efektivitas dukungan manajemen proyek.

5.1.1 Pendekatan Umum

Tujuan utama dari pengadaan jasa konsultan PMO pada Tahun Anggaran 2026 adalah untuk mengawal, memantau, dan mengambil langkah-langkah percepatan terhadap 226 Proyek dan 26 Program yang terdaftar sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Permenko Bidang Perekonomian No 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN dan Permenko Bidang Perekonomian No 19 Tahun 2025 tentang Penambahan Daftar PSN. Pendekatan umum yang digunakan dalam pekerjaan ini berfokus pada peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsultan akan memberikan dukungan substantif dan teknis kepada Project Management Office (PMO) dalam menjalankan fungsi koordinasi, prioritas, debottlenecking, monitoring, serta evaluasi untuk memastikan seluruh target PSN dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang diterima pemangku kepentingan.

Secara garis besar, pendekatan dan metodologi yang akan digunakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan dituangkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 1 Pendekatan Umum

No	Ruang Lingkup	Pendekatan Umum Pelaksanaan
1	Dukungan strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat, dan PMO KPPIP	a. Identifikasi isu strategis b. Pengumpulan data dan konsolidasi data lintas K/L c. Analisis kebijakan d. Penyusunan bahan/arahan <i>briefing</i> e. Validasi substansi
2	Pendampingan PMO untuk percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN)	a. Pemetaan proyek bermasalah b. Identifikasi hambatan c. Analisis akar masalah d. Fasilitasi solusi <i>debottlenecking</i> e. Monitoring tindak lanjut dan pelaporan progress PSN

No	Ruang Lingkup	Pendekatan Umum Pelaksanaan
3	Evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP)	a. Klasifikasi proyek berdasarkan kriteria prioritas b. Penilaian indikator PIP dan capaian progres c. Inventarisasi isu dan resiko pelaksanaan d. Analisis dampak ekonomi/strategis e. Laporan evaluasi dan rekomendasi
4	Pengumpulan data, analisis serta rekomendasi strategi monitoring PSN	a. Pemetaan kebutuhan dan sumber data b. Koordinasi dan sinkronisasi data K/L c. Verifikasi dan Validasi informasi d. Penyusunan dashboard/visualisasi progres e. Rekomendasi strategi tindak lanjut
5	Substansi rapat monitoring, debottlenecking & forum koordinasi lintas sektor	a. Pengumpulan agenda b. Penyusunan bahan rapat c. Verifikasi dan validasi informasi d. Penyusunan dashboard/visualisasi progres e. Integrasi hasil rapat ke database
6	Penyusunan substansi Laporan Presiden & Laporan Semester PSN	a. Kompilasi data b. Analisis capaian, kendala c. Penyusunan Executive summary d. Review internal e. Finalisasi dan Penyampaian laporan periodic (Juli/Desember)
7	Manajemen dan dokumentasi seluruh kegiatan KPPIP Semester II 2026	a. Pengelolaan arsip dan katalog digital b. Pengelompokan dokumen c. Inventarisasi dan pengendalian versi dokumen d. Standarisasi Metadata & kodefikasi e. Audit & penyerahan akhir

5.1.2 Pendekatan Perencanaan Umum

Pendekatan perencanaan umum dilaksanakan sebagai tahapan awal untuk memastikan dukungan PMO terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proses perencanaan dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi proyek sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan pendampingan intensif.

Metodologi yang digunakan mengadopsi pendekatan mix scanning, yaitu kombinasi antara penelaahan makro terhadap keseluruhan program dan pendalaman mikro pada proyek-proyek prioritas. Melalui pendekatan ini, PMO dapat memetakan isu strategis secara cepat tanpa mengabaikan detail operasional di tingkat pelaksanaan.

Tahapan kegiatan mencakup pengumpulan dan konsolidasi data dari kementerian/lembaga terkait, verifikasi dan validasi informasi, pemetaan progress dan kendala pelaksanaan proyek, serta analisis kebutuhan intervensi. Data yang diperoleh

dikelola dalam basis data terintegrasi sebagai rujukan tunggal (*single source of truth*) untuk mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya dilakukan penentuan prioritas dukungan menggunakan kriteria dampak strategis, tingkat kesiapan, urgensi permasalahan, dan kompleksitas koordinasi. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar penyusunan rencana kerja, alokasi sumber daya, serta jadwal pendampingan dan fasilitasi debottlenecking.

Melalui pendekatan ini, perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen kendali manajemen yang memastikan setiap aktivitas PMO bersifat tepat sasaran, responsif terhadap dinamika pelaksanaan, dan berorientasi pada percepatan penyelesaian proyek.

5.1.3 Pendekatan Pelaksanaan Koordinasi Project Manajemen Office (PMO) KPPIP

Ketua Tim Pelaksana KPPIP memberikan arahan kepada Team Leader Project Management Office (PMO) untuk melaksanakan fungsi-fungsi operasional dalam manajemen Proyek Strategis Nasional (PSN). Ruang lingkup pekerjaan tersebut meliputi pengelolaan basis data PSN, verifikasi dan penilaian usulan serta perubahan PSN, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PSN, penyiapan bahan rapat pembahasan dan koordinasi, serta penyusunan dan penyampaian laporan kepada Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Team Leader PMO didukung oleh Tenaga Ahli lintas sektor PSN serta Tenaga Administrasi. Tenaga Ahli PMO bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan utama, khususnya verifikasi dan penilaian usulan/perubahan PSN, pemantauan dan evaluasi PSN, serta penyiapan substansi dan materi pembahasan dalam forum rapat. Penugasan Tenaga Ahli mencakup seluruh sektor PSN, antara lain sektor sumber daya air, energi, transportasi dan jalan, dan kawasan.

Selain itu, pengelolaan *database* PSN menjadi salah satu tugas dan fungsi utama Tenaga Ahli PMO, yang mencakup kegiatan kompilasi, pemutakhiran, dan integrasi data serta informasi PSN secara terpadu. Basis data ini disiapkan sebagai sumber informasi yang komprehensif dan andal untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan perumusan tindak lanjut percepatan PSN oleh KPPIP. Dalam pelaksanaan pelaporan atas kegiatan verifikasi dan penilaian usulan/perubahan PSN maupun pemantauan dan evaluasi PSN, Tenaga Ahli PMO menyusun laporan teknis dengan dukungan Tenaga Administrasi PMO. Mekanisme penyampaian laporan hasil pekerjaan PMO dapat dilakukan melalui dua skema. Pertama, laporan disampaikan secara langsung kepada Ketua Tim Pelaksana KPPIP tanpa melalui forum Rapat Tim Pelaksana KPPIP. Kedua, hasil pekerjaan PMO

dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Tim Pelaksana KPPIP, kemudian dilaporkan secara terintegrasi sebagai bagian dari laporan hasil rapat kepada Team Leader PMO untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

5.1.4 Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan

Metode pendekatan dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dirancang untuk mendukung pelaksanaan mandat KPPIP secara efektif, terukur, dan akuntabel. Pendekatan ini disesuaikan dengan karakteristik tugas PMO yang bersifat koordinatif, analitis, dan strategis, serta mempertimbangkan kebutuhan pengguna (user needs) pada tingkat pengambil keputusan kebijakan.

Pendekatan yang digunakan bertujuan untuk:

- 1) Mendukung proses pengambilan keputusan Ketua dan Tim Pelaksana KPPIP secara berbasis data;
- 2) Memastikan seluruh kegiatan monitoring, evaluasi, dan debottlenecking PSN berjalan sistematis dan terdokumentasi;
- 3) Memudahkan penilaian kinerja PSN baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan ketersediaan data dan tingkat urgensi permasalahan;
- 4) Menjamin keterpaduan antara analisis isu, perumusan tindak lanjut, dan pelaporan kepada pimpinan, termasuk Presiden.

Mengingat ruang lingkup pekerjaan PMO KPPIP pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen proyek strategis lintas sektor, maka pendekatan gap analysis digunakan sebagai instrumen analitis utama untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting pelaksanaan PSN dengan kondisi yang diharapkan sesuai target kebijakan, regulasi, dan rencana aksi nasional. Gap analysis dalam konteks ini dimaksudkan sebagai alat manajemen dan kebijakan untuk mendukung fungsi monitoring, evaluasi, dan debottlenecking PSN. Adapun cakupan gap analysis dalam pekerjaan ini meliputi:

a. Proses Pelaksanaan PSN

Analisis dilakukan dengan membandingkan proses pelaksanaan PSN yang berjalan (eksisting) dengan proses ideal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, rencana aksi PSN, dan target penyelesaian proyek. Kesenjangan proses dapat mencakup, antara lain:

- 1) Ketidaksinkronan tahapan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan;
- 2) Hambatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- 3) Keterlambatan pengambilan keputusan strategis akibat proses birokrasi.

Hasil analisis ini digunakan untuk merumuskan tindak lanjut debottlenecking melalui mekanisme koordinasi KPPIP, termasuk pembahasan dalam rapat Tim Pelaksana dan/atau fasilitasi lintas kementerian/lembaga.

b. Data dan Informasi PSN

Analisis kesenjangan data dilakukan untuk menilai kecukupan, akurasi, dan keterpaduan data PSN yang digunakan dalam proses monitoring dan pelaporan. Fokus utama meliputi:

- 1) Konsistensi data progres fisik dan keuangan;
- 2) Ketersediaan data indikator kinerja proyek;
- 3) Keterpaduan data lintas sektor dan lintas sumber.

Hasil analisis ini menjadi dasar penguatan manajemen basis data PSN yang dikelola PMO guna mendukung penyusunan laporan semester, laporan Presiden, dan bahan rapat strategis.

c. Mekanisme Koordinasi dan Pengambilan Keputusan

Pendekatan ini menilai efektivitas mekanisme koordinasi yang telah berjalan, baik melalui rapat pemantauan, rapat debottlenecking, maupun komunikasi informal antar pemangku kepentingan. Kesenjangan yang diidentifikasi mencakup:

- 1) Keterbatasan tindak lanjut hasil rapat;
- 2) Ketidakjelasan penugasan dan penanggung jawab;
- 3) Perlunya eskalasi isu strategis ke tingkat pimpinan.

Analisis ini diarahkan untuk memperkuat fungsi KPPIP sebagai koordinator debottlenecking PSN, sesuai mandat Perpres dan Permenko terkait.

d. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan lapangan proyek PSN dengan kerangka kebijakan dan regulasi yang berlaku dengan fokus:

- 1) Identifikasi regulasi sektoral yang berpotensi menghambat percepatan PSN;
- 2) Kebutuhan harmonisasi kebijakan lintas sektor;
- 3) Perumusan masukan kebijakan berbasis temuan lapangan.

Hasil analisis menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan bagi Ketua Tim Pelaksana KPPIP. Seluruh hasil *gap analysis* diintegrasikan ke dalam siklus kerja PMO melalui penyusunan bahan rapat pemantauan dan debottlenecking, penyusunan notulensi dan ringkasan tindak lanjut,

penyusunan laporan periodik, laporan semester, dan laporan Presiden, serta Penyusunan rekomendasi strategis dan kebijakan.

Dengan pendekatan ini, pekerjaan Jasa Konsultansi tidak hanya bersifat administratif, tetapi berperan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan strategis KPPIP dalam memastikan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.PSN

5.1.5 Pendekatan Normatif

Kompleksitas pelaksanaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) pada Proyek Strategis Nasional (PSN) menuntut pendekatan kerja yang terstruktur, komprehensif, dan berorientasi pada percepatan penyelesaian hambatan (debottlenecking), tanpa menyimpang dari kerangka kebijakan dan regulasi yang berlaku. Ruang lingkup pekerjaan PMO secara langsung mendukung pelaksanaan tugas KPPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025, khususnya dalam fungsi koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan PSN lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pemahaman terhadap permasalahan PSN tidak hanya didasarkan pada kondisi faktual di lapangan, tetapi juga harus dianalisis dalam kerangka kebijakan nasional, regulasi sektoral, dan mekanisme pelaksanaan PSN sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini diperlukan agar berbagai hambatan pelaksanaan PSN baik yang bersifat regulatif, kelembagaan, teknis, maupun pendanaan dapat diidentifikasi secara tepat dan dirumuskan tindak lanjutnya melalui mekanisme koordinasi KPPIP.

Dalam pelaksanaan fungsi pendampingan, PMO menggunakan pendekatan normatif-operasional, yaitu pendekatan yang menelaah kesesuaian antara kondisi eksisting pelaksanaan PSN dengan ketentuan, kebijakan, dan arahan yang seharusnya berlaku. Pendekatan normatif difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, keputusan rapat koordinasi, serta dokumen perencanaan yang menjadi dasar penetapan, perubahan, dan pelaksanaan PSN sebagaimana diamanatkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025.

Pendekatan normatif ini bersifat aplikatif dan digunakan untuk mendukung fungsi PMO dalam mengidentifikasi kesenjangan kebijakan, inkonsistensi regulasi, serta hambatan implementasi yang memerlukan tindak lanjut percepatan melalui mekanisme PSN. Hasil analisis menjadi dasar penyusunan bahan pembahasan, rekomendasi teknis, dan tindak lanjut koordinatif yang disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana KPPIP, baik melalui pelaporan langsung maupun melalui forum Rapat Tim Pelaksana KPPIP.

Dengan demikian, pendekatan normatif-operasional digunakan untuk memastikan bahwa seluruh dukungan teknis PMO bersifat policy-relevant, implementable, serta selaras dengan mandat KPPIP dalam mengoordinasikan percepatan dan penyelesaian hambatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

5.1.6 Pendekatan *Debottlenecking*

Pendekatan debottlenecking digunakan sebagai kerangka kerja sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memfasilitasi penyelesaian hambatan utama yang mengganggu kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam konteks PSN yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan, hambatan tidak hanya bersumber dari aspek teknis, tetapi juga mencakup kendala regulatif, kelembagaan, pendanaan, serta sosial dan tata kelola.

Secara konseptual, pendekatan debottlenecking bertumpu pada prinsip teori sistem dan constraint management, yang memandang bahwa kinerja suatu sistem kompleks ditentukan oleh titik kendala terlemahnya. Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan PSN hanya dapat dicapai apabila hambatan utama yang bersifat kritis dapat diidentifikasi dan ditangani secara terfokus dan terkoordinasi. Dalam perspektif kebijakan publik, bottleneck juga dipahami sebagai bentuk implementation gap, yaitu kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan debottlenecking diterapkan melalui tahapan berikut:

1) Identifikasi Bottleneck

Dilakukan melalui pemantauan progres proyek, laporan lapangan, hasil rapat koordinasi, serta masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek. Hambatan yang diidentifikasi mencakup, antara lain, perizinan, pembebasan lahan, pendanaan, koordinasi kelembagaan, kesiapan desain, dan dinamika sosial.

2) Analisis Akar Masalah

Setiap bottleneck dianalisis untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, baik yang bersifat kebijakan, regulasi, tata kelola, maupun teknis operasional, sehingga penanganan tidak berhenti pada gejala permukaan.

3) Perumusan Tindak Lanjut Debottlenecking

Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan opsi tindak lanjut yang realistis dan dapat diimplementasikan, termasuk fasilitasi kebijakan, penyelarasan regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, atau eskalasi isu melalui mekanisme PSN.

4) Koordinasi Lintas Sektor melalui KPPIP

Tindak lanjut debottlenecking difasilitasi melalui forum koordinasi KPPIP, baik dalam Rapat Tim Pelaksana maupun mekanisme koordinasi lainnya, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangannya.

5) Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut dipantau secara berkala untuk memastikan hambatan benar-benar terselesaikan atau mengalami perbaikan signifikan, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian lanjutan.

Jenis hambatan yang umum ditemui dalam pelaksanaan PSN meliputi hambatan regulatif, finansial, institusional, teknis, serta sosial dan politik. Oleh karena itu, pendekatan debottlenecking tidak dilaksanakan secara sektoral atau parsial, melainkan melalui intervensi kebijakan yang terkoordinasi dan berbasis kewenangan.

Tabel 5. 2 Jenis Bottleneck dalam Proyek Infrastruktur

Kategori	Contoh
Regulatif	Prosedur perizinan yang kompleks, tumpang tindih regulasi pusat-daerah
Finansial	Pendanaan tidak tersedia tepat waktu, mekanisme cost recovery lemah
Institusional	Lemahnya koordinasi lintas K/L atau antara pusat dan daerah
Teknis	Desain proyek tidak siap, keterlambatan kontraktor
Sosial/Politik	Penolakan masyarakat, konflik lahan, dinamika politik lokal

Dengan Pemerintah memainkan peran penting dalam mempercepat proyek infrastruktur dan menghilangkan hambatan karena mereka sering menjadi penyandang dana utama, regulator, sekaligus fasilitator. Oleh karena itu, strategi pemerintah harus bersifat multi-dimensi, tidak hanya menyasar pelaksanaan proyek secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan pendukung yang memungkinkan percepatan pembangunan.

Berikut adalah strategi utama pemerintah:

1) Perencanaan Strategis yang Kuat dan Prioritisasi yang Tepat

- Visi Jangka Panjang dan Perencanaan Terintegrasi: Menyusun rencana infrastruktur nasional dan regional yang menyeluruh, berjangka panjang, dan selaras dengan tujuan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Hal ini memberikan arah yang jelas dan mengurangi ketidakpastian.
- Seleksi Proyek Berbasis Bukti: Memprioritaskan proyek berdasarkan analisis yang ketat terhadap dampak ekonomi, manfaat sosial, dan keberlanjutan. Ini menjamin alokasi sumber daya untuk proyek yang paling berdampak serta menghindari proyek "gajah putih."
- Pipeline Proyek yang Jelas: Menyusun daftar proyek yang transparan dan terstruktur, sehingga semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dapat melakukan perencanaan lebih baik.
- Asesmen Kebutuhan: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebutuhan infrastruktur di berbagai sektor guna mengidentifikasi kesenjangan kritis dan kebutuhan baru yang muncul.

2) Penyederhanaan Regulasi dan Proses Perizinan

- Layanan "Single Window": Menerapkan sistem satu pintu (one-stop service) untuk seluruh proses perizinan dan persetujuan, yang mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah dan memangkas birokrasi.
- Digitalisasi Proses: Mengalihfungsikan proses aplikasi, evaluasi, dan persetujuan ke sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlacakan.
- Persetujuan Berbatas Waktu: Menetapkan tenggat waktu yang jelas dan mengikat secara hukum untuk proses perizinan, serta sanksi bagi instansi yang tidak memenuhi batas waktu tersebut.
- Keterlibatan Dini dengan Regulator: Mendorong pelibatan awal antara pengembang proyek dan regulator sejak tahap perencanaan agar hambatan potensial dapat diidentifikasi dan diatasi lebih awal.
- Revisi dan Penyederhanaan Regulasi: Meninjau ulang secara berkala regulasi yang usang atau terlalu rumit untuk memastikan relevansi dan mendorong inovasi.
- Reformasi AMDAL: Menyederhanakan proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa mengurangi perlindungan lingkungan, misalnya melalui metode penilaian yang lebih tepat sasaran.

3) Optimalisasi Pendanaan dan Pembiayaan

- Sumber Pendanaan yang Beragam: Selain anggaran pemerintah, pemerintah perlu mendorong berbagai sumber pembiayaan, seperti:
 - a. Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS/PPP): Mengembangkan skema KPS yang jelas, dengan pembagian risiko yang adil untuk menarik investasi sektor swasta.
 - b. Dana Persiapan Proyek (PDF/PPF): Membangun fasilitas dana untuk mendukung tahap awal pengembangan proyek agar layak investasi.
 - c. Obligasi Hijau dan Pembiayaan Berkelanjutan: Memanfaatkan pasar keuangan hijau yang berkembang untuk proyek ramah lingkungan.
 - d. Tarif Layanan dan Cost Recovery: Menerapkan tarif layanan pengguna secara wajar untuk menjamin keberlanjutan finansial proyek.
- Pencairan Dana yang Tepat Waktu: Menyediakan sistem pembayaran yang efisien (misalnya escrow atau jadwal pembayaran jelas) untuk mencegah gangguan arus kas bagi kontraktor dan penyedia jasa.
- Penilaian Kelayakan Finansial dan Risiko: Melakukan studi kelayakan finansial yang komprehensif dan mengalokasikan risiko secara proporsional antara pemerintah dan mitra swasta.

4) Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan

- Lembaga Infrastruktur Terpusat: Mendirikan atau memperkuat lembaga yang secara khusus bertugas mengoordinasikan dan mempercepat proyek infrastruktur lintas kementerian dan pemerintah daerah.
- Pengembangan SDM: Investasi dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pejabat pemerintah di bidang perencanaan, pengadaan, manajemen proyek, dan pengawasan.
- Pengadaan yang Transparan: Menjamin proses pengadaan yang terbuka dan kompetitif untuk mencegah korupsi serta menjamin kualitas dan efisiensi anggaran.
- Mekanisme Akuntabilitas: Menetapkan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas untuk keterlambatan dan pembengkakan biaya proyek.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Membangun sistem data dan analisis yang kuat untuk memantau proyek, mengidentifikasi hambatan, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

5) Kolaborasi dan Inovasi

- Koordinasi Antar-Instansi: Memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dan antar level pemerintahan (pusat-daerah) dalam pelaksanaan proyek.
- Pelibatan Pemangku Kepentingan: Melibatkan masyarakat, LSM, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya sejak awal untuk mengurangi potensi penolakan dan meningkatkan kepemilikan proyek.
- Adopsi Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi canggih seperti BIM (Building Information Modeling), digital twin, dan otomatisasi konstruksi.
- Standarisasi dan Praktik Baik: Mengembangkan panduan standar, kontrak baku, dan praktik terbaik dalam manajemen proyek.

6) Penanganan Bottleneck Spesifik (Contoh Kasus)

- Pembebasan Lahan: Menyusun proses yang adil dan transparan dengan skema kompensasi yang jelas, pendekatan partisipatif, dan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigatif.
- Kekurangan Tenaga Kerja Terampil: Mendorong pelatihan vokasi, kemitraan dengan institusi pendidikan, dan jika diperlukan kebijakan imigrasi tenaga ahli.
- Rantai Pasok Material: Memantau ketersediaan bahan konstruksi penting, mendorong produksi dalam negeri, dan memperluas sumber pemasok.
- Tantangan Hukum: Menyederhanakan jalur hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan untuk menghindari penundaan proyek akibat gugatan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terpadu, pemerintah dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan proyek infrastruktur. Hal ini pada akhirnya akan membuka potensi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5.1.7 Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dukungan Project Management Office (PMO) dalam percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan secara konsisten dengan kerangka hukum, kebijakan nasional, serta kewenangan kelembagaan yang berlaku. Mengingat PSN merupakan instrumen kebijakan strategis yang pelaksanaannya melibatkan lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga, maka seluruh proses koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta fasilitasi penyelesaian hambatan harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis normatif diterapkan melalui penelaahan terhadap regulasi dan kebijakan yang menjadi dasar penetapan dan pelaksanaan PSN, termasuk kebijakan lintas sektor, keputusan rapat koordinasi, serta ketentuan teknis yang mengatur perizinan, pengadaan tanah, pendanaan, dan tata ruang. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara kondisi pelaksanaan PSN dengan norma hukum yang seharusnya berlaku, sekaligus mendeteksi potensi tumpang tindih regulasi, ketidaksinkronan kebijakan, atau kekosongan pengaturan yang berpotensi menghambat percepatan proyek.

Selain itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami penerapan regulasi tersebut dalam praktik pelaksanaan PSN. Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati dinamika implementasi kebijakan di lapangan, termasuk respons pemerintah daerah, pola koordinasi antarinstansi, serta kendala administratif dan kelembagaan yang muncul dalam penerapan ketentuan hukum. Temuan empiris ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas regulasi serta kebutuhan penyesuaian atau fasilitasi kebijakan melalui mekanisme koordinasi KPPIP.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris tersebut, dukungan PMO diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga aplikatif dan implementable, sehingga dapat mendukung peran KPPIP dalam mengoordinasikan percepatan, menyelesaikan hambatan, serta memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berjalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah

5.2 METODOLOGI PEKERJAAN

Metodologi pekerjaan disusun berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office (PMO) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kebijakan percepatan infrastruktur serta pengembangan wilayah. Pendekatan metodologis ini dirancang untuk memastikan dukungan yang efektif, terukur, dan selaras dengan mandat KPPIP dalam menjalankan fungsi koordinasi, monitoring, evaluasi, serta debottlenecking PSN dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP).

Pelaksanaan pekerjaan diawali dengan penajaman metodologi dan penyusunan rencana kerja yang operasional, dilanjutkan dengan proses pengumpulan dan analisis data yang relevan baik pada tingkat kebijakan maupun implementasi proyek. Metodologi ini bertujuan untuk menghasilkan basis data dan analisis yang andal sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi percepatan, serta bahan pelaporan kepada pimpinan dan Presiden Republik Indonesia.

5.2.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan fungsi PMO KPPIP, khususnya dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan penyelesaian hambatan pelaksanaan PSN. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu survei primer dan survei sekunder, yang saling melengkapi guna memperoleh data yang komprehensif, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua metode tersebut digunakan untuk memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat terkait kondisi kebijakan, progres proyek, permasalahan lapangan, serta dinamika koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha.

5.2.1.1 Metode Survei Primer

Survei primer dilaksanakan melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan dan melalui interaksi dengan pemangku kepentingan terkait PSN. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi aktual dan faktual mengenai pelaksanaan proyek, hambatan yang dihadapi, serta kebutuhan tindak lanjut percepatan. Pelaksanaan survei primer dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan usaha pelaksana proyek, serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan. Kegiatan ini difokuskan pada identifikasi isu strategis, bottleneck implementasi, serta efektivitas koordinasi dan dukungan kebijakan dalam pelaksanaan PSN.

Hasil survei primer menjadi masukan utama dalam proses analisis debottlenecking, penyusunan rencana aksi percepatan, serta perumusan rekomendasi kebijakan dan langkah koordinatif yang bersifat operasional.

5.2.1.2 Metode Survei Sekunder

Survei sekunder dilakukan melalui telaah dan pengumpulan data dari berbagai dokumen dan sumber resmi yang relevan dengan penyediaan dan pelaksanaan PSN. Metode ini mencakup penelaahan terhadap dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan proyek, regulasi dan kebijakan nasional maupun sektoral, serta data statistik yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan institusi terkait lainnya.

Survei sekunder bertujuan untuk memperoleh gambaran awal dan pemahaman kontekstual mengenai kebijakan, status proyek, capaian kinerja, serta kerangka regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan PSN. Data dan informasi yang dihimpun digunakan sebagai dasar analisis kebijakan, pemetaan isu strategis, serta penyusunan laporan monitoring dan evaluasi PSN.

Selain telaah dokumen, survei sekunder juga dilengkapi dengan diskusi terbatas bersama pihak terkait untuk mengklarifikasi data dan memperkaya pemahaman terhadap kondisi implementasi di lapangan.

5.2.2 Metode Analisis

Metode analisis digunakan untuk memastikan dukungan Jasa Konsultansi Badan Usaha terhadap pelaksanaan fungsi Project Management Office (PMO) KPPIP berjalan secara terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada penyelesaian hambatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP). Analisis dilakukan secara berjenjang, mulai dari dukungan strategis kebijakan, pendampingan operasional PMO, hingga penyusunan rekomendasi percepatan dan bahan pelaporan tingkat tinggi.

5.2.2.1 Dukungan Strategis kepada Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat, dan PMO KPPIP

Dukungan strategis diberikan untuk memperkuat fungsi pengambilan keputusan Ketua Tim Pelaksana, Sekretariat, dan PMO KPPIP melalui penyediaan analisis kebijakan dan fasilitasi diskusi teknis berbasis data. Dukungan ini ditujukan untuk memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) berjalan selaras dengan kebijakan nasional, efektif secara implementatif, serta responsif terhadap hambatan lintas sektor.

A. Inventarisasi Kebijakan dan Strategi yang Berlaku di Sektor Air, Jalan, Transportasi, Energi, dan Kawasan

Inventarisasi kebijakan dan strategi dilakukan untuk membangun pemahaman komprehensif terhadap kerangka regulasi dan perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan PSN. Kegiatan ini mencakup sektor sumber daya air, jalan dan jembatan, transportasi, energi, serta pengembangan kawasan, yang merupakan sektor utama dalam portofolio PSN.

Tahap awal dilakukan dengan penetapan ruang lingkup sektor dan sub-sektor yang relevan, yang dilanjutkan dengan pengumpulan dan penelaahan dokumen kebijakan dan strategi nasional maupun sektoral dimana dokumen-dokumen tersebut diklasifikasikan dan disistematiskan untuk kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun laporan inventarisasi.

Tabel 5. 3 Pelaksanaan Inventarisasi Kebijakan dan Strategi

Identifikasi Sektor dan Ruang Lingkup	Pengumpulan Dokumen Kebijakan dan Strategi	Klasifikasi dan Sistematisasi Dokumen	Penyusunan Laporan Inventarisasi
Menentukan cakupan sektor yang akan diinventarisasi	Melakukan akses terhadap dokumen nasional maupun sektoral	Menyusun analisis kesesuaian antara kebijakan dan proyek	Menyusun inventarisasi ringkasan kebijakan
1) Air: SDA, irigasi, pengendalian banjir, air baku 2) Jalan & Jembatan: jalan tol, nasional, strategis 3) Transportasi: darat, laut, udara, perkeretaapian 4) Energi: listrik, EBT, minyak-gas, energi desa 5) Kawasan: kawasan industri, pariwisata, ekonomi khusus (KEK)	1) RPJMN, RKP, RENSTRA K/L 2) Perpres, Permen, Inpres, Perda 3) Masterplan sektoral 4) Rencana Tata Ruang	1) Menganalisis keterkaitan antar dokumen 2) Mengidentifikasi gap atau tumpang tindih kebijakan 3) Menilai kesiapan dan kesesuaian regulasi terhadap implementasi proyek strategis	1) Ringkasan kebijakan per sektor 2) Temuan gap atau isu sinkronisasi 3) Rekomendasi harmonisasi kebijakan

Berdasarkan hasil klasifikasi, dilakukan analisis substansi dan sinkronisasi strategis untuk menilai kesesuaian antara kebijakan, rencana sektoral, dan kebutuhan implementasi PSN. Analisis ini difokuskan pada identifikasi gap kebijakan, tumpang tindih regulasi, serta potensi ketidaksinkronan antara perencanaan sektoral dan pelaksanaan proyek di lapangan. Hasil inventarisasi dan analisis kemudian dirangkum dalam laporan inventarisasi kebijakan per sektor yang dilengkapi dengan matriks kesesuaian kebijakan dan rekomendasi harmonisasi sebagai bahan pertimbangan strategis bagi KPPIP.

B. Diskusi Teknis dengan Stakeholder KPPIP

Diskusi teknis dengan stakeholder KPPIP dilaksanakan sebagai forum koordinatif dan solutif untuk membahas isu strategis dan hambatan pelaksanaan PSN secara langsung. Diskusi ini melibatkan Sekretariat KPPIP, PMO sektoral, kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, serta pelaksana proyek seperti BUMN dan badan usaha terkait.

Proses diskusi diawali dengan identifikasi dan pemetaan stakeholder kunci menggunakan pendekatan kepentingan dan pengaruh untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek. Selanjutnya disiapkan materi diskusi yang mencakup ringkasan isu utama, data progres proyek, hasil analisis kebijakan dan benchmarking, kebutuhan dukungan/ fasilitas melalui mekanisme PSN, serta alternatif solusi yang telah dirumuskan.

Pelaksanaan diskusi teknis dilakukan secara terstruktur melalui forum pleno atau diskusi kelompok terfokus, dengan pendekatan pemecahan masalah berbasis data. Diskusi diarahkan untuk mencapai kesepakatan atas permasalahan utama, merumuskan opsi solusi yang feasible, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang jelas.

Seluruh hasil diskusi didokumentasikan dalam bentuk notulensi resmi, pemutakhiran database PSN, serta rencana tindak lanjut yang memuat penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan. Hasil ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam bahan rekomendasi kebijakan, strategi percepatan PSN sektoral, serta laporan monitoring dan debottlenecking KPPIP. Diskusi teknis dapat dilaksanakan secara berulang dan adaptif sesuai dinamika pelaksanaan proyek dan kebutuhan pengambilan keputusan strategis.

5.2.2.2 Pendampingan PMO

Pendampingan PMO dilakukan untuk mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan debottlenecking PSN secara berkelanjutan. Analisis diawali dengan identifikasi tantangan dan permasalahan pelaksanaan proyek melalui survei lapangan, forum diskusi terfokus, dan penelaahan laporan progres proyek.

Informasi yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan SWOT dan Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk mengidentifikasi hambatan struktural maupun teknis, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, pembiayaan, maupun koordinasi lintas sektor. Berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun alternatif solusi regulatif dan implementatif yang dinilai dari sisi efektivitas, kesiapan implementasi, serta kesesuaian kewenangan.

Sebagai bagian dari pendampingan PMO, disusun laporan rapat pemantauan dan debottlenecking yang memuat hasil monitoring berbasis dashboard progres, pemetaan bottleneck, analisis akar masalah, serta rencana tindak lanjut yang jelas dan terukur. Laporan ini menjadi instrumen utama dalam pengambilan keputusan koordinatif di tingkat KPPIP.

A. Identifikasi Tantangan dan Perumusan Tindak Lanjut

Identifikasi tantangan dan perumusan tindak lanjut dilakukan untuk mendukung fungsi koordinatif KPPIP dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya melalui mekanisme debottlenecking lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hambatan pelaksanaan PSN dapat diidentifikasi secara dini, dirumuskan secara terstruktur, dan ditindaklanjuti melalui forum dan instrumen koordinasi yang menjadi kewenangan KPPIP.

Identifikasi tantangan dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil pemantauan progres proyek, laporan PMO sektoral, notulensi rapat koordinasi, serta hasil peninjauan lapangan dan diskusi teknis dengan pemangku kepentingan terkait. Tantangan yang diidentifikasi mencakup aspek regulasi, kelembagaan, perizinan, pembiayaan, kesiapan lahan, teknis konstruksi, serta koordinasi antara pelaksana proyek, kementerian/lembaga teknis, dan pemerintah daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa tantangan yang dirumuskan bersifat lintas sektor dan merefleksikan bottleneck utama yang memengaruhi capaian target PSN.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan analisis untuk mengelompokkan tantangan menurut tingkat urgensi, dampak terhadap jadwal dan biaya proyek, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan penanganan. Hasil analisis ini disusun dalam bentuk matriks tantangan PSN yang memuat jenis hambatan, proyek atau sektor terdampak, instansi terkait, serta status penanganan. Matriks ini menjadi dasar bagi KPPIP dalam menentukan isu-isu yang memerlukan fasilitasi dan koordinasi lebih lanjut.

Perumusan tindak lanjut dilakukan dengan mengarahkan setiap tantangan ke dalam mekanisme kerja PSN yang dikoordinasikan oleh KPPIP. Tindak lanjut dirumuskan dalam bentuk langkah koordinatif dan administratif yang dapat difasilitasi melalui rapat koordinasi, rapat pemantauan, audiensi bersama atau forum lintas kementerian/lembaga yang difasilitasi KPPIP. Tindak lanjut tersebut mencakup, antara lain, penjadwalan pembahasan isu dalam forum KPPIP, permintaan klarifikasi atau komitmen kepada kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah, serta pengawalan penyelesaian isu sesuai kewenangan masing-masing pihak.

B. Penyusunan Laporan Rapat Pemantauan dan Debottlenecking

Penyusunan Laporan Rapat Pemantauan dan Debottlenecking merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa tindak lanjut atas tantangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat dikawal secara sistematis, terkoordinasi, dan terukur melalui mekanisme KPPIP. Subbab ini menempatkan laporan rapat tidak sekadar sebagai dokumentasi administratif, tetapi sebagai alat kendali kebijakan (*policy control tool*) dalam siklus pemantauan, pengambilan keputusan, dan pengawalan tindak lanjut PSN.

Proses penyusunan laporan diawali dengan pemantauan progres proyek secara berkala berbasis data yang bersumber dari database pemantauan PSN, laporan Badan Usaha Pelaksana proyek, serta informasi sektoral dari Kementerian/Lembaga terkait selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama. Indikator yang dipantau mencakup progres perizinan, fisik, keuangan, status pembebasan lahan, serta isu koordinasi lintas instansi. Data tersebut digunakan untuk memverifikasi tantangan yang telah diidentifikasi pada, sekaligus menilai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dirumuskan.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, KPPIP memfasilitasi rapat pemantauan dan *debottlenecking* yang melibatkan Sekretariat KPPIP, PMO sektoral, Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Pelaksana proyek. Rapat difokuskan pada pembahasan tantangan prioritas yang berdampak langsung terhadap capaian target PSN, serta klarifikasi atas hambatan yang bersifat lintas sektor atau memerlukan intervensi kebijakan di tingkat koordinasi nasional, serta dukungan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek. Pendekatan yang digunakan bersifat problem-solving dan berbasis bukti, dengan menekankan kejelasan peran, kewenangan, dan batasan institusional masing-masing pihak.

Hasil rapat kemudian dituangkan secara sistematis dalam Laporan Rapat Pemantauan dan Debottlenecking berupa *minutes of meeting* dan notula resmi yang ringkasan jalannya rapat, daftar isu dan tantangan yang dibahas, serta rumusan tindak lanjut yang disepakati dalam forum KPPIP. Hasil rapat juga kembali dituangkan dalam database PSN yang terus dimutakhirkan seiring adanya isu, tantangan, atau progres pelaksanaan proyek secara time-series, sehingga memudahkan KPPIP dalam menilai efektivitas mekanisme debottlenecking yang telah dilakukan.

5.2.2.3 Evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas

Evaluasi Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dilakukan untuk memastikan kesesuaian proyek dengan kriteria PSN dan kebijakan percepatan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas, terdapat 37 Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dengan total nilai investasi sebesar Rp2.665,48 triliun. Seiring dengan perkembangan kebijakan percepatan pembangunan nasional, seluruh PIP tersebut telah diintegrasikan ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan debottlenecking PIP dilakukan sebagai satu kesatuan dalam mekanisme pengelolaan PSN di bawah koordinasi KPPIP.

Dalam konteks tersebut, evaluasi PIP tidak dilakukan sebagai proses terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari fungsi KPPIP dalam memastikan kesiapan, konsistensi kebijakan, dan kinerja proyek strategis nasional. Ruang lingkup evaluasi mencakup review kesesuaian proyek terhadap regulasi, evaluasi kerangka logis proyek, serta penilaian kinerja melalui indikator prioritas yang terukur

Manajerial.

5.2.2.4 Pengumpulan Data, Analisis, dan Rekomendasi Monitoring KPPIP

A. Pengembangan Sistem Pengumpulan Data (Template dan SOP)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terintegrasi dan berbasis bukti, dilakukan pengembangan sistem pengumpulan data yang terstandarisasi melalui penyusunan template data dan Standard Operating Procedure (SOP). Sistem ini dirancang untuk memastikan keseragaman, keterbandingan, dan keterlacakan data PSN lintas sektor dan wilayah, sebagaimana diperlukan dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh KPPIP.

Template pengumpulan data disusun sebagai instrumen baku yang digunakan oleh kementerian/lembaga teknis, PMO sektoral, dan unit pelaksana proyek dalam menyampaikan laporan perkembangan PSN secara periodik. Informasi utama yang dihimpun mencakup identitas proyek, lokasi, status perencanaan, progres fisik dan keuangan, status pembebasan lahan, perizinan, kendala utama, serta tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan. Template dirancang untuk menampung data kuantitatif dan kualitatif, serta dilengkapi dengan penanda waktu dan sumber data guna mendukung akuntabilitas dan validasi.

SOP pengumpulan data disusun untuk mengatur alur pelaporan, penanggung jawab, frekuensi penyampaian data, serta mekanisme verifikasi dan konsolidasi data di tingkat pusat. SOP ini menegaskan peran KPPIP dalam melakukan validasi, integrasi, dan pemutakhiran data PSN sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi tindak lanjut melalui koordinasi lintas sektor. Dengan adanya template dan SOP yang jelas, proses pengumpulan data PSN

menjadi lebih konsisten dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan percepatan proyek.

B. Pengolahan dan Analisis Data untuk Perumusan Tindak Lanjut PSN

Data yang telah dihimpun selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk menghasilkan gambaran kinerja PSN yang objektif dan mudah diinterpretasikan. Tahapan awal meliputi pembersihan dan konsolidasi data guna memastikan akurasi informasi yang dianalisis untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan tren waktu untuk menampilkan kondisi aktual proyek, deviasi terhadap target, serta pola keterlambatan atau kendala yang berulang.

Analisis difokuskan pada identifikasi proyek dan sektor yang memerlukan perhatian prioritas, termasuk proyek dengan progres di bawah target, kendala pembebasan lahan, perizinan, atau isu koordinasi lintas instansi. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi KPPIP dalam merumuskan agenda rapat pemantauan, menetapkan isu strategis yang perlu dibahas, serta menyusun tindak lanjut yang bersifat koordinatif maupun kebijakan.

Dengan pendekatan ini, pengolahan data tidak berhenti pada penyajian informasi, tetapi diarahkan secara langsung untuk mendukung fungsi KPPIP dalam memfasilitasi debottlenecking dan percepatan pelaksanaan PSN melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sesuai dengan tata cara monitoring dan evaluasi PSN yang berlaku.

C. Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Verifikasi dan penilaian usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025. Usulan PSN diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh badan usaha dan/atau Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), disertai dengan dokumen pendukung yang mencakup rekomendasi kementerian/lembaga berwenang, rencana pembiayaan, kajian proyek, rencana aksi, serta peta lokasi proyek.

Berdasarkan penugasan Menko Perekonomian, Ketua Tim Pelaksana KPPIP memberikan arahan kepada Project Management Office (PMO) untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian terhadap kelengkapan, kesiapan, serta kesesuaian usulan PSN dengan kebijakan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, PMO dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau pihak terkait lainnya sesuai dengan substansi proyek yang dinilai.

Proses verifikasi dan penilaian difokuskan pada aspek kesesuaian regulasi, kesiapan teknis dan pembiayaan, kelayakan implementasi, serta kontribusi proyek terhadap pencapaian sasaran strategis nasional. Hasil verifikasi dan penilaian dituangkan dalam laporan teknis yang disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana KPPIP sebagai bahan pembahasan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan laporan tersebut, Ketua Tim Pelaksana KPPIP menyelenggarakan rapat pembahasan internal Tim Pelaksana KPPIP dan/atau memfasilitasi rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. PMO bertugas menyiapkan materi rapat dan mendokumentasikan hasil pembahasan dalam bentuk risalah atau laporan hasil rapat. Selanjutnya, PMO menyusun dokumen usulan dan konsep surat Menko Perekonomian kepada Presiden terkait penetapan PSN, untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pelaksana KPPIP sebelum disampaikan kepada Menko Perekonomian.

D. Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan Perubahan Proyek Strategis Nasional (PSN)

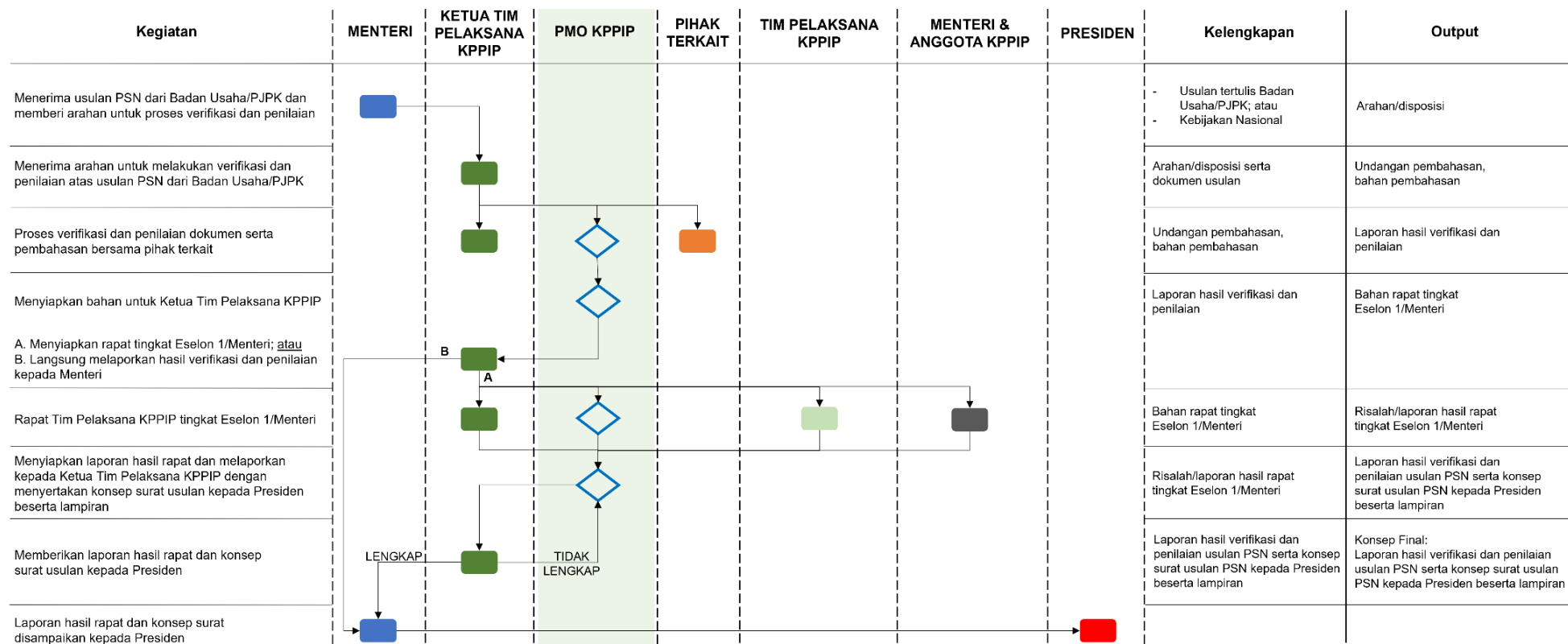
Verifikasi dan penilaian usulan perubahan PSN dilaksanakan untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur, perubahan lingkup proyek, dan/atau penghapusan proyek dari daftar PSN, sebagaimana diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025. Usulan perubahan diajukan secara tertulis kepada Menko Perekonomian oleh badan usaha dan/atau PJPK, disertai alasan perubahan dan/atau kajian perubahan lingkup proyek sesuai jenis usulan yang diajukan.

Berdasarkan penugasan dari Menko Perekonomian, Ketua Tim Pelaksana KPPIP memberikan arahan kepada PMO untuk melaksanakan verifikasi dan penilaian atas usulan perubahan PSN. Proses ini dapat melibatkan kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan telah mempertimbangkan aspek kebijakan, teknis, dan implikasi pelaksanaan proyek.

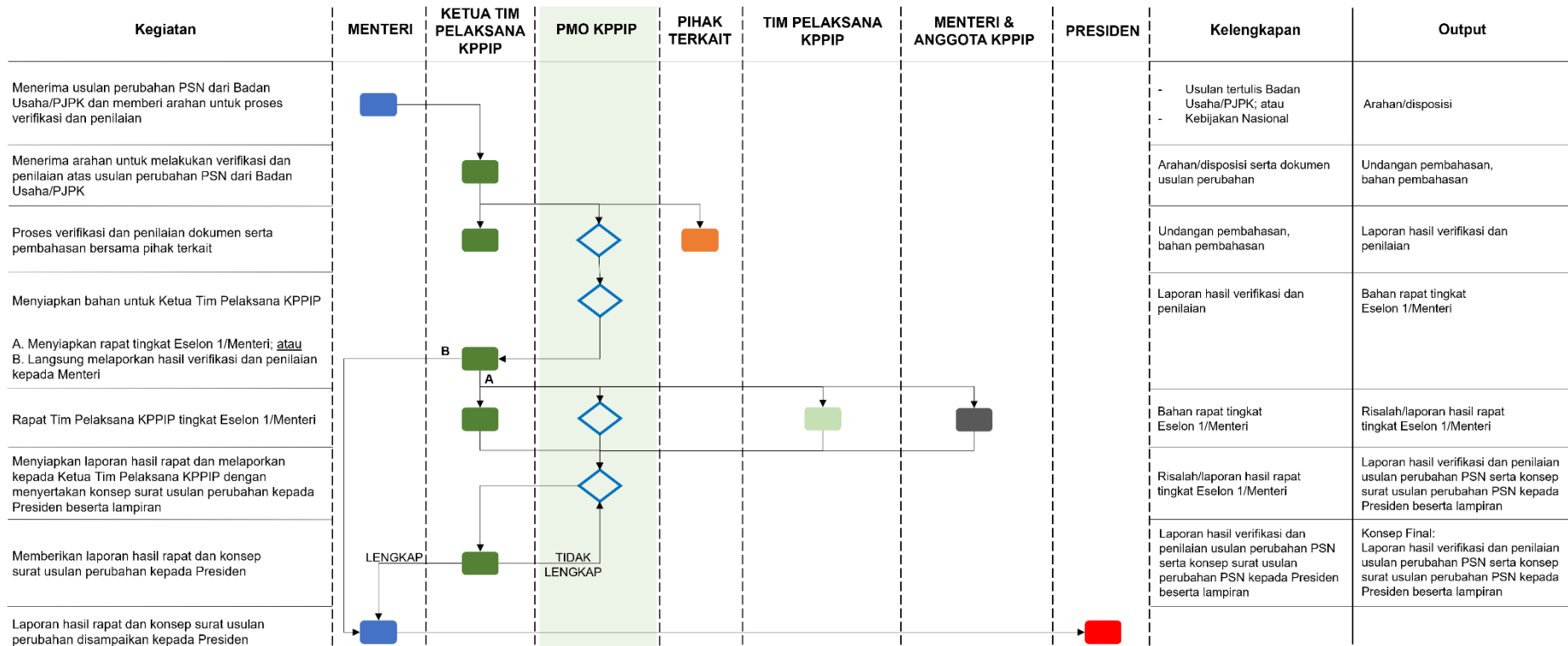
Verifikasi dan penilaian dilakukan untuk menilai relevansi perubahan terhadap tujuan PSN, dampaknya terhadap kesiapan dan kinerja proyek, serta implikasinya terhadap daftar PSN secara keseluruhan. Hasil proses tersebut dituangkan dalam laporan verifikasi dan penilaian sebagai dasar pembahasan lebih lanjut di tingkat KPPIP.

Berdasarkan laporan dimaksud, Ketua Tim Pelaksana KPPIP memfasilitasi rapat pembahasan atau rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. PMO menyiapkan materi rapat dan menyusun risalah atau laporan hasil rapat. Selanjutnya, PMO menyiapkan dokumen usulan dan konsep surat Menko Perekonomian kepada Presiden terkait perubahan PSN untuk dilakukan

pemeriksaan oleh Tim Pelaksana KPPIP sebelum disampaikan kepada Menko Perekonomian guna memperoleh persetujuan.



Gambar 5. 1 Diagram Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan suatu Proyek Strategis Nasional



Gambar 5. 2 Tata Cara Verifikasi dan Penilaian Usulan Perubahan suatu Proyek Strategis Nasional

5.2.2.5 Penyusunan Substansi Rapat Monitoring dan Forum Koordinasi

A. Identifikasi Topik Strategis

Identifikasi topik strategis dilakukan untuk mendukung efektivitas rapat monitoring dan koordinasi PSN yang diselenggarakan oleh KPPIP. Proses ini dilaksanakan secara berkala (mingguan dan bulanan) dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi PSN, termasuk laporan progres proyek, dashboard pemantauan, hasil kunjungan lapangan, serta masukan dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek.

Topik strategis diseleksi berdasarkan kriteria prioritas, antara lain urgensi terhadap target penyelesaian PSN, keterkaitan lintas sektor atau lintas wilayah, potensi kebutuhan intervensi koordinatif atau kebijakan, serta ketersediaan data pendukung. Topik yang terpilih disusun dalam kalender substansi rapat sebagai panduan agenda pembahasan KPPIP, sekaligus menjadi dasar penugasan PMO dalam menyiapkan bahan analisis dan dokumen pendukung. Dengan pendekatan ini, agenda rapat bersifat terencana, fokus pada isu prioritas, dan mendukung percepatan pengambilan keputusan.

B. Penyusunan Briefing Paper untuk Ketua Tim Pelaksana

Untuk setiap topik strategis yang akan dibahas, PMO menyusun briefing paper sebagai bahan pengantar dan pegangan Ketua Tim Pelaksana KPPIP atau pimpinan rapat. Briefing paper disusun secara ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada pengambilan keputusan, sehingga memudahkan pimpinan rapat dalam mengarahkan diskusi dan merumuskan tindak lanjut.

Briefing paper memuat ringkasan isu utama, konteks kebijakan dan regulasi yang relevan, data progres dan permasalahan aktual, serta isu kunci yang memerlukan arahan atau kesepakatan lintas sektor. Apabila diperlukan, disertakan opsi tindak lanjut yang bersifat koordinatif maupun administratif sesuai kewenangan KPPIP. Dokumen ini disiapkan secara dinamis dan dapat diperbarui hingga menjelang pelaksanaan rapat untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini. Dengan briefing paper yang terstruktur, proses rapat menjadi lebih fokus, efisien, dan berbasis bukti.

C. Penyusunan Notulensi dan Ringkasan Keputusan Rapat

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan rapat monitoring dan koordinasi PSN, disusun notulensi rapat dan ringkasan keputusan sebagai dokumen resmi pengikat hasil pembahasan. Notulensi disusun secara sistematis untuk mencatat jalannya diskusi, posisi dan masukan masing-masing pihak, serta klarifikasi yang berkembang selama rapat. Ringkasan keputusan disajikan secara ringkas dan eksekutif, memuat arahan, keputusan, dan tindak lanjut yang disepakati.

5.2.2.6 Penyusunan Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN

A. Konsolidasi Hasil Rapat, Progres Proyek, dan Capaian Indikator

Penyusunan laporan semester PSN atau laporan khusus kepada Presiden diawali dengan konsolidasi menyeluruh atas hasil pelaksanaan PSN selama periode pelaporan. Konsolidasi dilakukan dengan menghimpun dan menyelaraskan informasi utama yang bersumber dari notulensi rapat monitoring dan koordinasi, laporan progres fisik dan keuangan proyek, capaian indikator kinerja, hasil debottlenecking, serta masukan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek.

Proses konsolidasi tidak hanya bersifat kompilatif, tetapi juga analitis, dengan memastikan konsistensi dan keterpaduan data antar sumber. PMO melakukan validasi silang antara data dashboard PSN, laporan sektoral, dan hasil rapat KPPIP untuk menghasilkan narasi tunggal yang mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan PSN, termasuk capaian, kendala utama, dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Hasil konsolidasi ini menjadi dasar utama penyusunan substansi laporan dan penilaian kinerja PSN secara nasional.

B. Visualisasi Data dan Penyajian Informasi Strategis

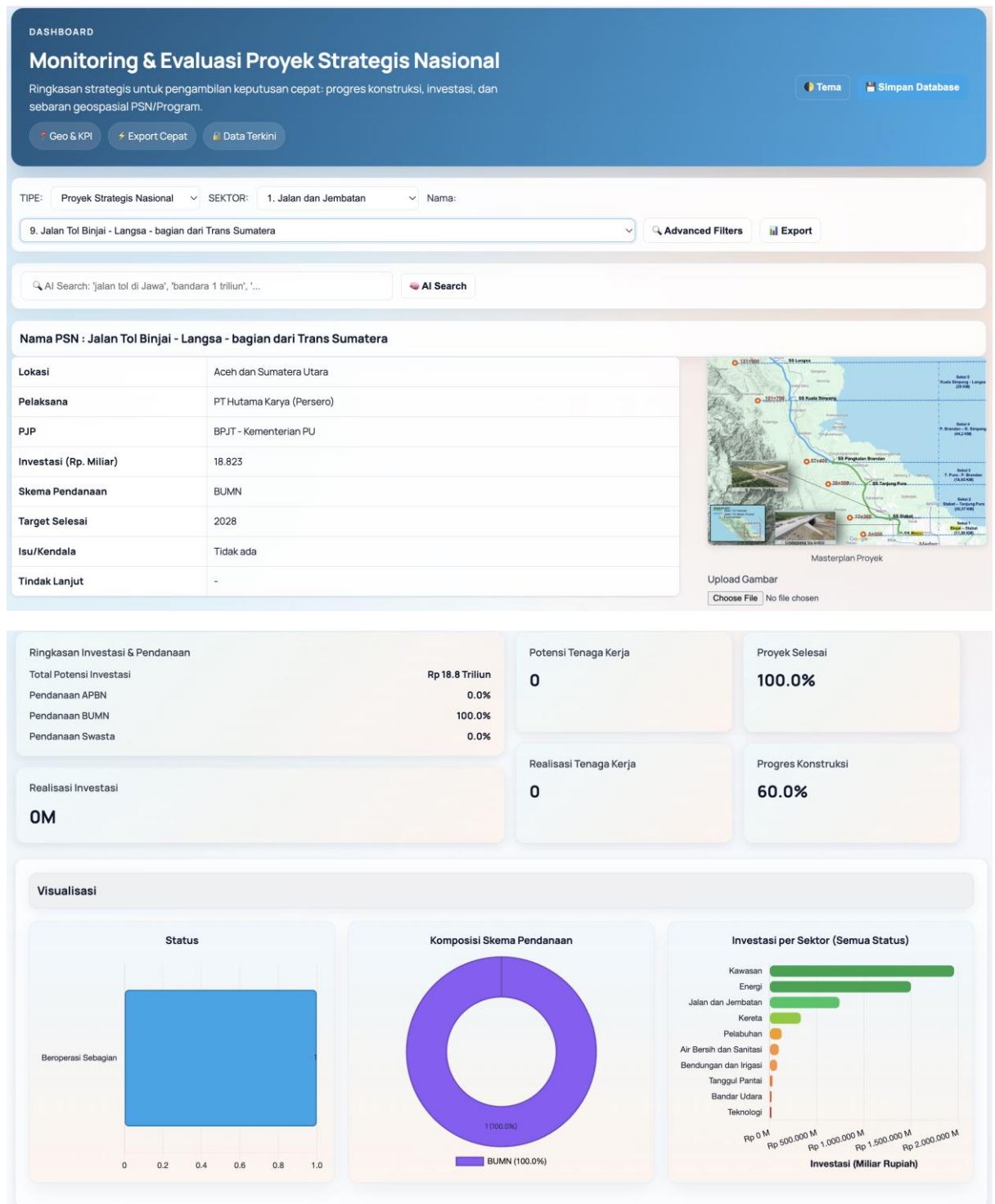
Data dan informasi yang telah terkonsolidasi selanjutnya disajikan dalam bentuk visualisasi yang ringkas dan mudah dipahami untuk mendukung komunikasi kebijakan tingkat tinggi. Visualisasi difokuskan untuk menampilkan tren capaian PSN, sebaran proyek secara spasial, serta perbandingan kinerja antar sektor dan wilayah.

Bentuk visualisasi yang digunakan meliputi grafik tren progres fisik dan keuangan, peta sebaran PSN berbasis wilayah dan sektor, serta diagram perbandingan capaian dan kendala utama.

- Grafik tren untuk menggambarkan progres capaian proyek secara kumulatif dan periodik (misal: bulan ke bulan), baik dari sisi fisik maupun keuangan.
- Peta sebaran PSN yang menunjukkan lokasi proyek berdasarkan sektor dan provinsi, dilengkapi indikator status (misal: hijau = sesuai target, merah = deviasi tinggi).
- Diagram batang atau radar untuk perbandingan performa antar sektor (transportasi, energi, SDA, kawasan).
- Infografik kendala dan solusi untuk memetakan jenis-jenis bottleneck yang paling dominan (izin, lahan, pendanaan) dan frekuensinya

Penyajian visual dirancang untuk menegaskan pesan utama laporan dan memudahkan pengambil keputusan dalam memahami kondisi PSN secara cepat

dan komprehensif. Seluruh visualisasi dilengkapi dengan keterangan yang jelas dan konsisten dengan narasi laporan, serta disusun menggunakan data yang telah tervalidasi oleh KPPIP.



Tabel Detail PSN

Filter Kolom Tampilan

Tambah Data Pilih Semua Hapus Semua

☒ Status Proyek ☐ Target Nilai Investasi (Miliar Rupiah) ☐ Sumber APBN (Miliar Rupiah) ☐ Sumber BUMN (Miliar Rupiah) ☐ Sumber Swasta (Miliar Rupiah) ☐ Sumber Pendanaan (APBN/UM, BUMN, Swasta, Gabungan)
☐ Penanggung Jawab Proyek ☐ Badan Usaha Pelaksana Proyek (Holding) ☒ Penetapan PSN ☐ Tahun Masuk ☐ Progres Pengadaan Tanah % ☐ Estimasi Pengadaan Tanah LMAN (Miliar Rupiah)
☐ Progres Konstruksi % ☐ Estimasi Penyelesaian ☐ Waktu Update Status Proyek ☐ Isu/Tantangan ☒ Tindak Lanjut ☐ Potensi Tenaga Kerja
☐ Realisasi Tenaga Kerja

Aksi	NO.	Nama PSN	Sektor	Pulau	Lokasi	Kabupaten/Kota	Status	Penetapan PSN	Tindakan
	9	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sum...	Jalan dan Jembatan	SUMATERA	Aceh dan Sumatera Utara		Beroperasi Sebagian	Perpres 58	

Peta Lokasi PSN

Gambar 5. 3 Dashboard Monitoring PSN

C. Penyuntingan dan Finalisasi Naskah Laporan

Tahapan akhir adalah penyuntingan dan finalisasi naskah laporan untuk memastikan kualitas substansi, konsistensi data, dan ketepatan penyampaian kepada Presiden. Proses ini mencakup peninjauan struktur dokumen, keakuratan angka dan indikator, serta kesesuaian gaya bahasa yang formal, jelas, dan bebas dari jargon teknis yang tidak diperlukan.

Laporan disusun dengan struktur yang sistematis, diawali dengan ringkasan eksekutif yang menyoroti capaian utama, isu strategis, dan arah tindak lanjut, diikuti dengan uraian substansi dan lampiran pendukung. Finalisasi dilakukan melalui mekanisme penelaahan internal KPPIP sebelum memperoleh persetujuan Ketua Tim Pelaksana. Laporan yang telah disetujui selanjutnya disiapkan dalam format resmi untuk disampaikan kepada Presiden, termasuk apabila diperlukan dalam bentuk bahan paparan pendukung.

5.2.2.7 Manajemen dan Dokumentasi Kegiatan KPPIP Semester I dan Semester II 2026

A. Pembuatan Logbook Kegiatan

Pembuatan logbook kegiatan merupakan instrumen dasar dalam pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan dukungan teknis PSN. Logbook digunakan untuk mencatat secara sistematis seluruh aktivitas tim pendukung, baik yang bersifat koordinatif, teknis, maupun administratif, yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas KPPIP.

Logbook disusun secara periodik (harian atau mingguan) dengan format baku yang memuat informasi pokok meliputi waktu pelaksanaan, jenis dan tujuan kegiatan, lokasi atau media pelaksanaan, ringkasan substansi, serta output atau dokumen yang dihasilkan. Logbook dikelola secara terpusat dan diperbarui secara konsisten sebagai basis pemantauan kinerja, penelusuran kegiatan,

serta bahan pendukung penyusunan laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan PSN.

B. Dokumentasi Kegiatan dan Produk Kerja dalam Sistem Arsip Terstruktur

Seluruh kegiatan dan produk kerja yang tercatat dalam logbook selanjutnya didokumentasikan dalam sistem arsip yang terstruktur dan mudah ditelusuri. Dokumentasi mencakup dokumen rapat dan koordinasi, kebijakan dan regulasi terkait PSN, laporan teknis dan pemantauan proyek, serta catatan kegiatan lapangan dan masukan stakeholder.

Pengelolaan dokumentasi dilakukan dengan pengelompokan yang jelas berdasarkan jenis dokumen, periode waktu, dan substansi kegiatan. Sistem dokumentasi ini bertujuan memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat, mendukung proses monitoring dan evaluasi, serta memudahkan penelusuran dokumen dalam rangka pelaporan, audit, dan pengambilan keputusan oleh KPPIP.

C. Penyusunan Laporan Akhir Semester Kegiatan Pendukung PSN

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dukungan teknis, disusun laporan akhir semester yang memuat ringkasan kegiatan, capaian utama, tantangan pelaksanaan, serta pembelajaran (*lesson learned*) selama periode pelaporan. Laporan ini disusun berdasarkan hasil konsolidasi logbook, dokumentasi kegiatan, serta capaian monitoring dan evaluasi PSN.

Laporan akhir semester disajikan secara ringkas dan analitis, dengan menekankan kontribusi kegiatan terhadap penguatan fungsi koordinasi, monitoring, dan debottlenecking PSN oleh KPPIP. Dokumen ini menjadi bahan evaluasi internal, dasar perbaikan strategi kerja periode berikutnya, serta referensi dalam penyusunan laporan strategis PSN kepada pimpinan.

BAB VI

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

6.1 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan pelaksana pekerjaan menyusun suatu jadwal/rencana kerja yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka dalam hal ini kami sebagai penyedia jasa layanan konsultansi mencoba menguraikan rencana jadwal pelaksanaan pekerjaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan terorganisasi, baik konsultasi antara tenaga ahli maupun antara tenaga ahli dan pemberi pekerjaan.

Kami selaku konsultan yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Officer* (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN akan dilaksanakan selama 9,5 bulan.

Untuk menunjang dan mendukung kelancaran dalam proses penyelesaian setiap tahapan pekerjaan kami sebagai konsultan penyedia jasa layanan akan memberikan semua kemampuan yang dimiliki dengan didukung oleh tenaga ahli yang kami sediakan sesuai dengan bidang serta keahlian yang dimiliki serta sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yang telah disusun oleh pengguna jasa, disamping itu untuk menghasilkan pekerjaan yang diinginkan oleh pihak pemberi pekerjaan kami menyusun program rencana pelaksanaan pekerjaan sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan menyimpang dari apa yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dengan perancangan program rencana kerja tersebut semua pekerjaan akan terselesaikan dengan sangat baik. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan tersusunnya rencana kerja tersebut diatas kami selaku penyedia layanan jasa konsultansi yang sangat berminat dalam dalam melaksanakan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Officer* (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN, berharap dapat menyajikan atau menghasilkan suatu pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Kami yakin dengan rencana kerja yang kami susun tersebut dapat menghasilkan suatu pekerjaan yang sangat optimal. Untuk Jadwal pelaksanaan dapat di lihat pada Tabel 6.1

Tabel 6. 1 JADWAL RENCANA KERJA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN

No	Kegiatan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5				Bulan Ke-6				Bulan 7				Bulan 8				Bulan 8				Bulan-10	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
A	PERSIAPAN																																						
	1. Pemahaman terhadap TOR/KAK																																						
	2. Kajian awal data sekunder																																						
	3. Pemahaman dan Penajaman Metodologi																																						
	4. Kajian Awal Permasalahan PSN																																						
	5. Paparan Laporan Pendahuluan																																						
B	PENGUMPULAN DATA																																						
	1. Pembangunan Baseline Database																																						
C	INVENTARISASI																																						
	1. Pemetaan PSN Prioritas																																						
	2. Penyusunan Template Kerja																																						
	3. Penyusunan SOP																																						

No	Kegiatan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5				Bulan Ke-6				Bulan 7				Bulan 8				Bulan 8				Bulan-10	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
	4. Monitoring Progres Awal PSN																																						
	5. Penyusunan Logbook																																						
D	ANALISIS																																						
	1. Evaluasi logframe dan indikator proyek																																						
	2. Penyusunan briefing paper dan notulensi																																						
	3. Visualisasi data dan peta PSN																																						
	4. Pemantauan proyek berkala																																						
	5. Diskusi teknis debottlenecking																																						
	6. Pendampingan PMO																																						
E	PELAPORAN																																						
	1. Laporan Pendahuluan/Rencana kerja tim PMO																																						
	2. Laporan periodik dukungan tim PMO dan Dashboard PSN																																						
	3. Substansi Laporan Presiden PSN																																						

No	Kegiatan	Bulan Ke-1				Bulan Ke-2				Bulan Ke-3				Bulan Ke-4				Bulan Ke-5				Bulan Ke-6				Bulan 7				Bulan 8				Bulan 8				Bulan-10	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2				
	4. Substansi Laporan Semester PSN																																						
	5. Laporan Final Kegiatan																																						

BAB VII

KOMPOSISI TIM, PENUGASAN TENAGA AHLI, DAN ORGANISASI

PELAKSANAAN

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER (PMO)* DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

Jasa **PT. Prospera Consulting Engineers** membentuk tim kerja untuk kegiatan **Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung *Project Management Officer (PMO)* Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN**, yang secara fungsional dapat langsung berhubungan dengan pemberi tugas dalam rangka penyelesaian kegiatan tersebut. Tim kerja terdiri dari 8 (delapan) orang tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, serta dibantu 1 (satu) orang tenaga pendukung.

7.1 Komposisi Tim

Komposisi Tim disusun untuk memastikan dukungan *Project Management Office (PMO)* dalam membantu **Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP)** berjalan efektif, responsif, dan berbasis kompetensi. Struktur tim dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan kompleksitas Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bersifat lintas sektor dan lintas kewenangan. Pengaturan komposisi ini dimaksudkan agar seluruh fungsi analisis, fasilitasi debottlenecking, penyusunan rekomendasi, serta dukungan koordinatif kepada KPIIP dapat dilaksanakan secara terintegrasi, akuntabel, dan selaras dengan mandat percepatan PSN.

Tabel 7. 1 Rincian Personel Tenaga Ahli Jasa Konsultasi Badan Usaha Pendukung *Project Management Officer (PMO)* Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN

No	Posisi/Jabatan	Personel	Durasi Pekerjaan
1	<i>Team Leader/</i> Tenaga Ahli Madya Manajemen <i>Project Management Office (PMO)</i> Infrastruktur	Enrico Rahadi, ST., MM	9,5 bulan
2	<i>Co-Team Leader/</i> Tenaga Ahli Madya Kebijakan <i>Project Management Office (PMO)</i> Infrastruktur	Irfan Rachman Widjaja Kusmirat, ST., M.PWK	9,5 bulan
3	Tenaga Ahli Muda Database dan Pelaporan	Edi Kus Budiharjo, ST	9,5 bulan
4	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1 (Sektor Energi)	Nur Rhaeni Febrianti Ekaningtiyas, S.PWK	9,5 bulan
5	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2 (Sektor Transportasi dan Perhubungan)	Farida Puspita Rini, ST	9,5 bulan

No	Posisi/Jabatan	Personel	Durasi Pekerjaan
6	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3 (Sektor Jalan dan Jembatan)	Gatot Subroto, ST., M.Ars	9,5 bulan
7	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4 (Sektor Sumber Daya Air)	Rizky Farandy, ST	9,5 bulan
8	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 5 (Sektor Kawasan Industri)	Ari Nur Cahyo, ST	9,5 bulan
9	Tenaga Ahli Muda Pembiayaan	Ajeng Ria Desiana, S.Si	9,5 bulan
10	Asisten Tenaga Ahli	Rampi Melati, ST	9,5 bulan
11	Design Grafis	Hallandhea Radhina Ladyla, S.Sn	9,5 bulan
12	Tenaga Pendukung Office Manager	Sri Purwanti, SK	9,5 bulan
13	Tenaga Pendukung Sekretaris Tim	Graha Tantry Praba, S,Kom	9,5 bulan
14	Tenaga Pendukung Operator Komputer	Panji Baskoro, SE	9,5 bulan
15	Tenaga Pendukung Pengemudi	Miskun	9,5 bulan
16	Tenaga Pendukung Kurir	Beni Eka Somantri	9,5 bulan

7.2 Penugasan Tenaga Ahli

Penugasan Tenaga Ahli dilakukan secara terstruktur dan berbasis kebutuhan untuk memastikan dukungan PMO kepada **KPPIP** dapat berjalan optimal sesuai dinamika pelaksanaan PSN. Keterlibatan masing-masing tenaga ahli ditetapkan berdasarkan tahapan pekerjaan, kompleksitas isu yang dihadapi, serta kebutuhan analisis dan fasilitasi debottlenecking yang berkembang. Dengan demikian, penugasan bersifat fleksibel namun tetap terencana, sehingga setiap tenaga ahli dapat memberikan kontribusi sesuai kompetensinya dalam mendukung fungsi koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian hambatan PSN secara efektif dan tepat waktu. Adapun penugasan tenaga ahli yang dibentuk oleh dapat dilihat pada Tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7. 2 Uraian Tugas Tenaga Ahli Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Officer (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
1	Enrico Rahadi, ST., MM	<i>Team Leader/</i> Tenaga Ahli Madya Manajemen <i>Project Management Office</i> (PMO) Infrastruktur	Ahli Manajemen	• Mimimpin pelaksanaan PMO untuk proyek dan program PSN • Melakukan riset, analisa data, analisis <i>benchmark</i>, dan tren sosio-ekonomi ke depan terkait infrastruktur, pengembangan wilayah, dan ekonomi. • Menyusun strategi pengumpulan data dan verifikasi serta memfasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah/BUMN/BUMD/swasta/dsb. • Memimpin analisis isu yang dihadapi proyek PSN dan merekomendasikan solusi dengan mempertimbangkan <i>benchmark</i> dan pembelajaran di lapangan. • Memberikan dukungan lainnya (<i>ad-hoc</i>) yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja KPPIP bagi Ketua Tim Pelaksana KPPIP dan Sekretaris Pelaksana KPPIP.	9,5 bulan
2	Irfan Rachman Widjaja	<i>Co-Team Leader/Tenaga Ahli Madya Kebijakan Project</i>	Ahli Kebijakan	• Membuat rencana aksi untuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur PSN;	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
	Kusmirat, ST., M.PWK	<i>Management Office</i> (PMO) Infrastruktur		- Mengkoordinasikan dan memastikan tercapainya target dari rencana aksi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur PSN; - Melakukan analisis awal terkait hambatan proyek PSN dan tindak lanjut yang dibutuhkan. - Menyiapkan dan mendukung fasilitasi diskusi dengan pemangku kepentingan yang dibutuhkan. - Menghadiri rapat pemantauan dan <i>debottlenecking</i> tentang PSN. - Memberikan dukungan lainnya (ad-hoc) yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja KPPIP bagi Ketua Tim Pelaksana KPPIP, Sekretaris Pelaksana KPPIP dan Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP.	
3	Edi Kus Budiharjo, ST	Tenaga Ahli Muda Database dan Pelaporan	Ahli Database	- Mengumpulkan data terkait perkembangan seluruh pelaksanaan PSN pada tingkat proyek dan program; - Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada seluruh sektor proyek dan program sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>,	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; - Menyusun rekapitulasi laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada seluruh sektordan program PSN sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Menyusun draft laporan pelaksanaan PSN setiap semester serta Laporan SK Tim PMO KPPIP setiap bulan; - Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	
4	Nur Rhaeni Febrianti Ekaningtiyas, S.PWK	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1 (Sektor Energi)	Ahli Energi	- Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor energi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor energi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; - Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor energi sesuai dengan kebutuhan KPPIP;	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	
5	Farida Puspita Rini, ST	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2 (Sektor Transportasi dan Perhubungan)	Ahli Transportasi	- Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor transportasi sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor transportasi dan perhubungan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; - Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor transportasi dan perhubungan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	9,5 bulan
6	Gatot Subroto, ST., M.Ars	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3 (Sektor Jalan dan Jembatan)	Ahli Jalan dan Jembatan	- Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor jalan	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				dan jembatan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor jalan dan jembatan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	
7	Rizky Farandy, ST	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4 (Sektor Sumber Daya Air)	Ahli Sumber Daya Air	• Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor SDA sesuai dengan kebutuhan KPPIP; • Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; • Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor SDA sesuai dengan kebutuhan KPPIP;	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	
8	Ari Nur Cahyo, ST	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 5 (Sektor Kawasan Industri)	Ahli Kawasan	- Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor Kawasan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor Kawasan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; - Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada sektor Kawasan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	9,5 bulan
9	Ajeng Ria Desiana, S.Si	Tenaga Ahli Muda Pembiayaan	Ahli Pembiayaan	- Mengumpulkan data terkait perkembangan pelaksanaan PSN pada sektor Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Melakukan analisis dan evaluasi Pelaksanaan PSN pada sektor Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan KPPIP;	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				- Membantu penyiapan kegiatan Rapat Koordinasi, <i>Focus Group Discussion</i>, Seminar, dan <i>Workshop</i> yang sesuai dengan lingkup kegiatan; - Menyusun laporan Monitoring Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya pada sektor Pembiayaan sesuai dengan kebutuhan KPPIP; - Memberikan dukungan kepada <i>Team Leader</i> dan Tenaga Ahli lainnya.	
10	Rampi Melati, ST	Asisten Tenaga Ahli	Asisten Tenaga Ahli	- Menyiapkan administrasi kegiatan Team Leader dalam maupun luar kota. - Menyusun bahan rapat internal Badan Usaha dalam rangka evaluasi kerja Badan Usaha Konsultan; - Menyusun laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada Pimpinan.	9,5 bulan
11	Hallandhea Radhina Ladyla, S.Sn	Design Grafis	Ahli Desain Grafis	- Melakukan pekerjaan layouting laporan kegiatan pelaksanaan PSN; - Membuat design ucapan selamat perayaan hari raya nasional pada kanal media sosial KPPIP; - Menyusun template design slide paparan KPPIP.	9,5 bulan

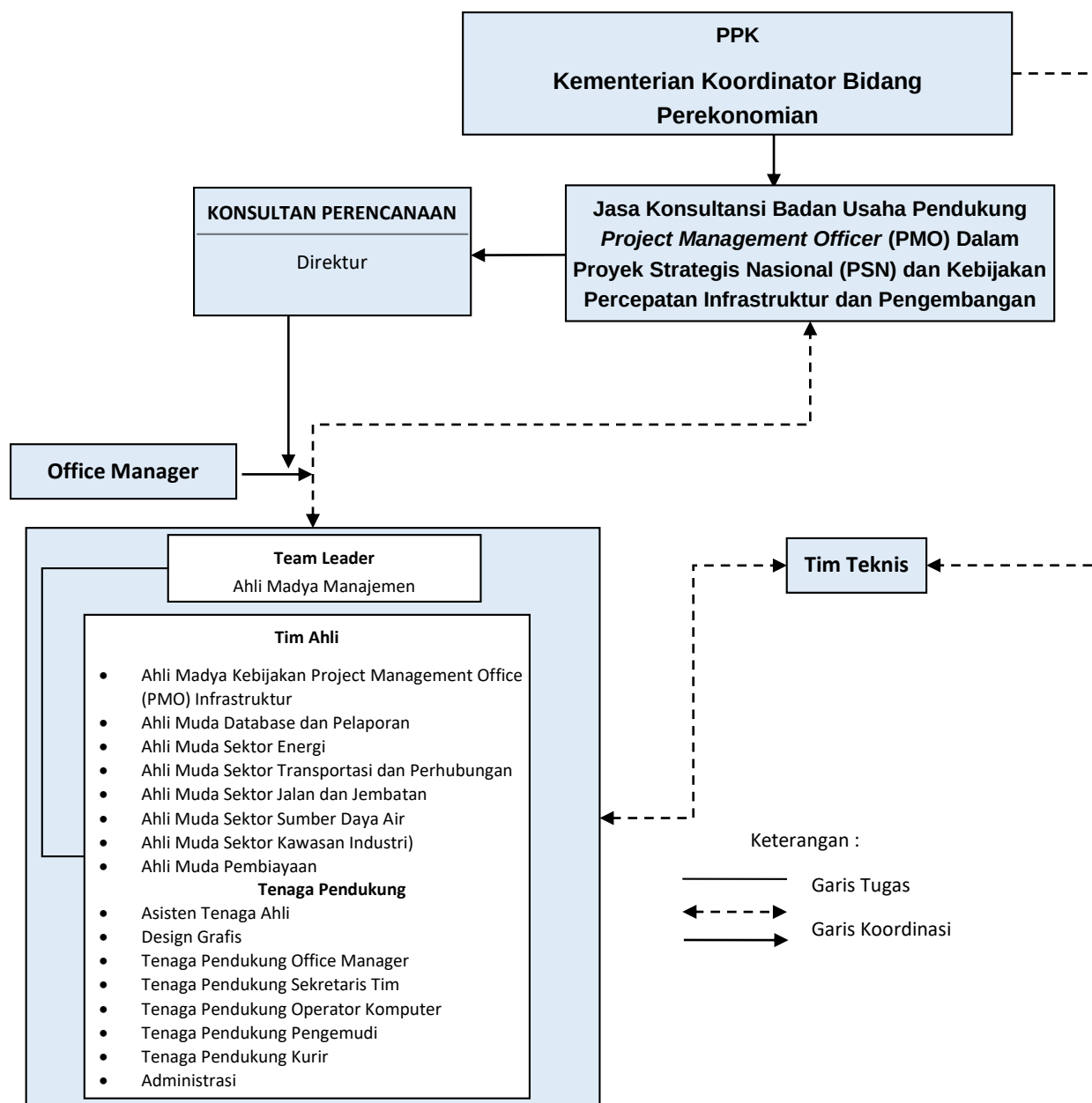
No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
12	Sri Purwanti, SK	Tenaga Pendukung Office Manager	Tenaga Pendukung	- Mengkoordinasikan dan memastikan semua fungsi dan tanggung jawab tenaga ahli, teknis, dan pendukung lainnya berjalan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. - Memastikan pemenuhan output kinerja dan bukti kehadiran Tenaga Ahli Individu dan Badan Usaha di Sekretariat KPPIP. - Memastikan laporan semesteran KPPIP, laporan presiden, laporan akhir tahun dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PSN dapat berjalan sesuai dengan target. - Membantu KPPIP dalam pengurusan semua dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas ke Luar Negeri (tidak terbatas pada Pengurusan Visa, reference letter) untuk Pejabat KPPIP termasuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan dan instansi lain terkait (jika diperlukan untuk mempercepat proses Visa terbit).	9,5 bulan
13	Graha Tantry Praba, S,Kom	Tenaga Pendukung Sekretaris Tim	Tenaga Pendukung	- Mengelola arsip dan korespondensi KPPIP dengan baik dan benar. - Membantu pimpinan dalam menyusun jadwal dan agenda kegiatan sehari-hari.	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				- Membantu tugas-tugas tenaga ahli lain dalam menyiapkan surat-menyurat (korespondensi). - Menjadi narahubung para stakeholder KPPIP dalam melakukan penjadwalan kegiatan.	
14	Panji Baskoro, SE	Tenaga Pendukung Operator Komputer	Tenaga Pendukung	- Berkoordinasi dengan PPK dan staff PPK terkait pengelolaan laporan dan pertanggungjawaban badan usaha untuk proses pembayaran. - Melakukan inventarisasi seluruh dokumen terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPPIP secara terstruktur dan sistematis - Memberikan dukungan kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP dalam hal pengoperasian server KPPIP.	9,5 bulan
15	Miskun	Tenaga Pendukung Pengemudi	Tenaga Pendukung	- Memberikan layanan antar jemput kegiatan dinas bagi anggota PMO KPPIP dengan menggunakan kendaraan operasional KPPIP. - Memberikan layanan antar jemput kegiatan operasional bagi Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP dengan menggunakan kendaraan operasional KPPIP. - Merawat dan menjaga kebersihan kendaraan operasional KPPIP serta	9,5 bulan

No	Personil	Usulan Posisi/Jabatan	Lingkup Keahlian	Tugas dan Tanggung Jawab	Durasi Pekerjaan
				menjadi narahubung dengan pihak bengkel penyedia kendaraan. Membantu penugasan lain yang membutuhkan kekuatan fisik.	
16	Beni Eka Somantri	Tenaga Pendukung Kurir	Tenaga Pendukung	- Melakukan pengantaran surat dan dokumen yang bersifat mendesak kepada stakeholder KPPIP. - Membantu distribusi laporan pelaksanaan KPPIP. - Bekerjasama dengan tenaga pendukung kebersihan ruang kerja KPPIP untuk melakukan jamuan pada tamu rapat kegiatan dalam kantor. - Membantu penugasan lain yang membutuhkan kekuatan fisik.	9,5 bulan

7.3 Organisasi Personil

Organisasi dan personil disusun untuk memastikan pelaksanaan dukungan PMO dalam percepatan PSN berjalan efektif, terkoordinasi, dan akuntabel. Struktur organisasi menggambarkan hubungan kerja antara pemberi tugas dan pelaksana pekerjaan, serta mekanisme koordinasi internal tim dalam mendukung fungsi fasilitasi, analisis, pemantauan, dan penyelesaian hambatan melalui mekanisme KPPIP. Susunan organisasi ini dirancang untuk memastikan alur komando yang jelas, pembagian tugas yang proporsional, serta efektivitas koordinasi internal tim dalam memberikan dukungan teknis dan rekomendasi strategis kepada KPPIP. Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 7.1 berikut.



Gambar 7. 1 Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan

Berdasarkan bagan struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan diatas, dapat dilihat hubungan antar *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan **Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Officer (PMO)* Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN**. Peran dan fungsi antara pengguna jasa (pemberi tugas) dan Konsultan sebagai penyedia jasa dalam organisasi pelaksanaan kegiatan ini, meliputi:

1. **Pengguna Jasa** sebagai Pemberi Tugas adalah PPK **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**, memiliki peran dan fungsi berikut:
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Penyusun kerangka acuan tugas dan spesifikasi teknis yang jelas sesuai dengan pekerjaan;
 - c. Pemberi informasi yang diperlukan Tim Pekerjaan Konsultan;
 - d. Pemberi informasi yang diperlukan Tim Pekerja Konsultan;
 - e. Partner Konsultan dalam melakukan konsultasi, perundingan dan negosiasi yang bersifat administratif maupun teknis; dan
 - f. Pemberi saran, usul dan kritik, terhadap hasil rancangan yang dihasilkan tim Konsultan apabila kurang sesuai dengan permasalahan yang ada.
2. **Penyedia Jasa** (Konsultan) adalah PT. Prospera Consultant Engineers, berkewajiban untuk menjalankan fungsi, meliputi:
 - a. Wajib mengikuti kebijakan/ peraturan, ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang ditetapkan oleh **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**;
 - b. Wajib berkonsultasi kepada pemberi tugas atau tim teknis yang ditunjuk; dan
 - c. Wajib menciptakan dan membina hubungan yang baik dengan instansi/organisasi berkaitan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
3. **Tim Kerja Konsultan**, yang terdiri dari: Team Leader, Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung dengan peran dan fungsi yang dimiliki sebagai berikut:
 - a. Team Leader merupakan personil yang bertanggung jawab secara keseluruhan kepada pemimpin proyek, mengkoordinasikan seluruh pekerjaan tim konsultan dengan bantuan tenaga pendukung;
 - b. Tenaga Ahli merupakan personil yang memiliki keahlian di bidangnya yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing masing; dan
 - c. Tenaga Pendukung bertugas melaksanakan tugasnya sebagai pembantu tenaga ahli dalam pekerjaan ini.

Dalam struktur organisasi yang terbentuk, terdapat jalur koordinasi dan komando sebagai berikut :

- a. *Team Leader (TL)* akan bekerja penuh mulai dari ditandatanganinya kontrak sampai berakhirnya kegiatan sesuai dengan kontrak. Team Leader (TL) juga dibantu dengan manajemen konsultan yang bertanggung jawab terhadap

pejabat pembuat komitmen beserta tim teknis yang dibentuknya dalam hal pelaksanaan pekerjaan;

- b. Dalam struktur organisasi Konsultan, Ketua Tim (*Team Leader*) juga bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pekerjaan kepada manajemen konsultan;
- c. Tim ahli yang terdiri dari berbagai disiplin keilmuan yang terkait bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya kepada ketua tim (team leader) dan bersama-sama dengan ketua tim (team leader) melakukan serangkaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati; dan
- d. Tenaga pendukung bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan dalam membantu pekerjaan Tenaga Ahli.

BAB VIII

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER* (PMO) DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

Jadwal Penugasan Tenaga Ahli disusun dengan mempertimbangkan karakter pekerjaan yang bersifat dinamis, lintas sektor, dan memerlukan respons cepat terhadap perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Mengingat dukungan Project Management Office (PMO) kepada KPPIP mencakup fungsi koordinasi, analisis kebijakan, fasilitasi debottlenecking, serta pemantauan dan evaluasi, maka mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung dirancang secara terintegrasi sesuai tahapan dan kebutuhan pekerjaan.

Penugasan dilakukan secara proporsional dan fleksibel, dengan tetap menjaga kesinambungan dukungan sepanjang periode pelaksanaan. Beberapa tenaga ahli dapat dimobilisasi secara paralel untuk menangani isu strategis yang memerlukan penanganan simultan, sementara penugasan lainnya disesuaikan dengan prioritas dan kompleksitas permasalahan yang muncul. Seluruh personil dari tim konsultan memiliki durasi pekerjaan yang sama sehingga dapat dimobilisasi secara bersamaan. Rincian jadwal penugasan personil diuraikan pada bagian berikut:

Tabel 8.1 Jawal Penugasan Tenaga Ahli

No	Posisi/Jabatan	Personel	Timeline Pelaksanaan Pekerjaan										Durasi Pekerjaan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Manajemen Project Management Office (PMO) Infrastruktur	Enrico Rahadi, ST., MM											9,5 bulan
2	Co-Team Leader/Tenaga Ahli Madya Kebijakan Project Management Office (PMO) Infrastruktur	Irfan Rachman Widjaja Kusmirat, ST., M.PWK											9,5 bulan
3	Tenaga Ahli Muda Database dan Pelaporan	Edi Kus Budiharjo, ST											9,5 bulan
4	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 1 (Sektor Energi)	Nur Rhaeni Febrianti Ekaningtiyas, S.PWK											9,5 bulan

No	Posisi/Jabatan	Personel	Timeline Pelaksanaan Pekerjaan										Durasi Pekerjaan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 2 (Sektor Transportasi dan Perhubungan)	Farida Puspita Rini, ST											9,5 bulan
6	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 3 (Sektor Jalan dan Jembatan)	Gatot Subroto, ST., M.Ars											9,5 bulan
7	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 4 (Sektor Sumber Daya Air)	Rizky Farandy, ST											9,5 bulan
8	Tenaga Ahli Muda Infrastruktur 5 (Sektor Kawasan Industri)	Ari Nur Cahyo, ST											9,5 bulan
9	Tenaga Ahli Muda Pembiayaan	Ajeng Ria Desiana, S.Si											9,5 bulan
10	Asisten Tenaga Ahli	Rampi Melati, ST											9,5 bulan
11	Design Grafis	Hallandhea Radhina Laldyla, S.Sn											9,5 bulan
12	Tenaga Pendukung Office Manager	Sri Purwanti, SK											9,5 bulan
13	Tenaga Pendukung Sekretaris Tim	Graha Tantry Praba, S.Kom											9,5 bulan
14	Tenaga Pendukung	Panji Baskoro, SE											9,5 bulan

No	Posisi/Jabatan	Personel	Timeline Pelaksanaan Pekerjaan										Durasi Pekerjaan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Operator Komputer												
15	Tenaga Pendukung Pengemudi	Miskun											9,5 bulan
16	Tenaga Pendukung Kurir	Beni Eka Somantri											9,5 bulan

Sumber: KAK dan Identifikasi Konsultan, Tahun 2026

BAB IX

DAFTAR RIWAYAT HIDUP USULAN PERSONEL

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER* (PMO) DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

BAB X

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

JASA KONSULTANSI BADAN USAHA PENDUKUNG *PROJECT MANAGEMENT OFFICER* (PMO) DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK KEMUDAHAN PSN



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

JL. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Telp. (021) 3521835 – Fax. (021) 3511643

Kode Pos 10710

Website : <https://ekon.go.id>, email : humas@ekon.go.id

J A K A R T A

